



LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN 1 TAHUN 2018

Peningkatan Pengetahuan Penerjemah Setjen Dan BK DPR RI
Tentang Isu-Isu Strategis yang Berpotensi Menjadi Bahan
Terjemahan

Oleh:

YUDI CHANDRI SETIAWAN, S.Pd

NIP. 199112232018031001

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKTUALISASI

“PENINGKATAN PENGETAHUAN PENERJEMAH SETJEN DAN BK DPR RI TENTANG ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPOTENSI MENJADI BAHAN TERJEMAHAN”

Nama : Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP : 199112232018031001
Jabatan : Calon Penerjemah Ahli Pertama
Instansi : Biro Kerja Sama Antar Parlemen

Bogor, 2 Oktober 2018

Mengetahui,
Coach



Dr. Ujianto Singgih P., M.Si.
NIP.196411191990031003

Menyetujui,
Mentor



Fusrudin Arief Budiman, S.S., M.Si.
NIP.197011051997031007

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang mana atas bimbingannya maka penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS dan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai salah satu prasyarat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan Aktualisasi ini dapat diselesaikan karena tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M. selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Ibu Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil. selaku Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen.
3. Bapak Sartomo, S.S., M.Si. selaku Kepala Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota
4. Ibu Elvira Dianti A., S.S., M.Si. selaku Kepala Subbagian Alih Bahasa
5. Bapak DR. Ujianto Singgih P., M.Si. selaku selaku *coach*
6. Bapak Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si. selaku mentor.
7. Teman-teman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Laporan ini menyajikan dokumentasi atas proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis sebagai Calon Penerjemah Ahli Pertama di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS di lingkungan kerja sehari-hari. Maka diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi baik dari segi pemikiran/gagasan, maupun memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak terkait.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 30 September 2018

Yudi Chandri Setiawan, S.Pd

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

I	TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
A	ORGANISASI/UNIT KERJA.....	1
B	JABATAN PESERTA.....	2
II	RANCANGAN AKTUALISASI.....	3
A	DESKRIPSI ISU.....	3
B	PEMILIHAN ISU PRIORITAS.....	5
C	RANCANGAN JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI.....	5
III	PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	9
A	MATRIK PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS..	9
B	PENJELASAN PERUBAHAN.....	14
C	CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	14
D	ANALISIS MANFAAT DAN MANFAAT.....	14
E	TANTANGAN/HAMBATAN.....	16
IV	PENUTUP.....	16
A	KESIMPULAN.....	16
B	SARAN.....	16
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. LAMPIRAN KEGIATAN 1**
- 3. LAMPIRAN KEGIATAN 3**
- 4. LAMPIRAN KEGIATAN 4**
- 5. LAMPIRAN KEGIATAN 5**

BAGIAN I

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Organisasi/Unit Kerja

Peserta menjabat sebagai Penerjemah Ahli Pertama, Secara struktur Posisi Jabatan Fungsional Penerjemah berada dibawah Kepala Subbagian Alih Bahasa di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dalam Biro Kerja Sama Antar Parlemen,

I. Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP)

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) pasal 182 menjelaskan bahwa Biro KSAP) mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 182, Biro KSAP menyelenggarakan fungsi:

- a.* Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro KSAP.
- b.* Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro KSAP
- c.* Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro KSAP
- d.* Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro KSAP.
- e.* Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).
- f.* Pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan BKSAP.
- g.* Penyelenggaraan persidangan kerja sama organisasi internasional dan dukungan analisis terhadap isu internasional.
- h.* Penyelenggaraan persidangan kerja sama organisasi regional dan dukungan analisis terhadap isu regional.
- i.* Penyelenggaraan persidangan kerja sama organisasi regional dan dukungan analisis terhadap isu bilateral.
- j.* Penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota DPR RI.
- k.* Penyelenggaraan dukungan alih bahasa.
- l.* Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan.
- m.* Penyusunan laporan kinerja Biro KSAP.
- n.* Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

II. Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna)

Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna) adalah Salah satu bagian yang ada di Biro KSAP Setjen dan BK DPR RI dimana tugas dan fungsinya di jelaskan di Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 pasal 197.

Bagian Minluna mempunyai tugas penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota DPR RI serta penyelenggaraan dukungan alih bahasa.

Bagian Minluna menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Minluna
- b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang kegiatan kegiatan luar negeri Anggota DPR RI.
- c. Pelaksanaan kegiatan di bidang kegiatan luar negeri anggota DPR RI.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan atau materi dan pelayanan rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri anggota DPR RI.
- e. Pelaksanaan dukungan alih bahasa.
- f. Pelaksanaan tata usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota DPR RI.
- g. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro KSAP; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro KSAP

Bagian Minluna terdiri atas;

- a. Subbagian Penyiapan Administrasi.

Subbagian Penyiapan Administrasi mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan bahan/materi, pelayanan rapat, dan tata usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota DPR RI.

- b. Subbagian Alih Bahasa.

Subbagian Alih Bahasa mempunyai tugas melakukan dukungan alih bahasa.

B. Jabatan Peserta

Peserta menjabat sebagai Penerjemah Ahli Pertama yang ditempatkan di Bagian Minluna dalam Biro KSAP Setjen DPR RI . Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat, peserta memiliki tugas:

1. Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik;
2. Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum;
3. Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi;
4. Melakukan penerjemahan lisan parainterpreting.

BAGIAN II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. DESKRIPSI ISU

1. ISU KE-1

Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

- Jabatan Fungsional Penerjemah di Setjen DPR RI mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penerjemahan tulis tentang naskah bahaninformasi publik, naskah hukum, naskah biografi, dan melakukan penerjemahan lisan untuk membantu kinerja Anggota DPR khususnya dalam rangka menjalin kerja sama dengan parlemen negara lain. Dalam menerjemahkan tentu saja penerjemah tidak hanya mengalih bahasa-kan kata per kata dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi seorang penerjemah juga harus paham substansi dari bahan terjemahan tersebut sehingga hasil terjemahan menjadi lebih akurat dan berterima. Berkaitan dengan hal tersebut, penerjemah di Setjen DPR RI sering mengalami kesulitan dalam menerjemahkan karena kurangnya informasi tentang isu-isu strategis internasional yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Penerjemah merasa kurang berkoordinasi dengan sekretariat yang menangani isu-isu internasional terkini khususnya yang menjadi topik yang akan diterjemahkan. Selain masalah tersebut, penerjemah sering merasa kekurangan waktu dalam mengkaji materi isu-isu internasional yang menjadi bahan terjemahan karena bahan kajian baru diberikan di hari yang sama dengan waktu tugas penerjemahan.
- Dampak jika masalah ini tidak dibenahi adalah kemampuan kapasitas penerjemah terhambat karena kekurangan informasi tentang isu-isu strategis internasional yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Selain masalah tersebut, Hasil terjemahan menjadi kurang akurat dan mempengaruhi hasil kinerja dari Anggota DPR RI dalam melakukan kerja sama antar parlemen.

2. ISU KE-2

Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.

- Dalam proses penerjemahan, penerjemah di lingkungan Setjen DPR RI sering mendapatkan keluhan dari perwakilan delegasi negara lain tentang tidak tersedianya jабaran kegiatan Anggota Dewan dalam bahasa inggris di situs dpr.go.id. Hal tersebut terjadi karena kurang nya koordinasi antara Biro pemberitaan parlemen, Bidang Data Teknologi dan Informasi, dan penerjemah. Penerjemah di lingkungan Setjen DPR RI jarang mendapatkan permintaan untuk menerjemahkan laporan kegiatan kunjungan

yang dilakukan Anggota Dewan atau laporan kunjungan yang diterima Anggota Dewan yang hasil terjemahan nya langsung terintegrasi dengan situs dpr.go.id.

- Dampak jika masalah ini tidak dibenahi adalah kegiatan Anggota DPR RI kurang tersosialisasi dengan baik yang mungkin mempengaruhi citra DPR RI khususnya di dunia internasional.

3. ISU KE-3

Kurangnya konsistensi penggunaan istilah-istilah dalam penerjemahan di lingkungan Setjen DPR RI.

- Setiap Penerjemah pasti mempertimbangkan diksi (pemilihan kata/istilah) yang paling akurat dalam setiap proses penerjemahan. Penerjemah di lingkungan Setjen DPR menghadapi masalah tentang kurangnya konsistensi penggunaan istilah – istilah dalam penerjemahan salah satu nya adalahkasus dalam menerjemahkan kata “Mahkamah Kehormatan Dewan” ke dalam bahasa Inggris, beberapa penerjemah menerjemahkan dengan istilah “Ethic Council” dan beberapa penerjemah lain menerjemahkan dengan istilah “Ethic Committee” dalam segi makna kedua kata tersebut memiliki arti yang hampir sama dan kedua kata tersebut bisa digunakan untuk menerjemahkan “Mahkamah Kehormatan Dewan”. Masalah inkonsistensi istilah tersebut membuat penerjemah merasa kebingungan dalam memilih istilah mana yang paling akurat.
- Dampak jika masalah ini tidak dibenahi adalahhasil terjemahan dari penerjemah menjadi kurang akurat dan mempengaruhi hasil kinerja dari Anggota DPR RI dalam melakukan kerja sama antar parlemen.

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.	5	4	5	14
2	Masih kurangnya berita-berita berbahasa Inggris di situs dpr.go.id tentang kegiatan Anggota Dewan saat menerima delegasi dari negara lain.	4	3	3	10
3	Kurangnya konsistensi penggunaan istilah-istilah dalam penerjemahan di lingkungan Setjen DPR RI.	3	5	4	12

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah :

Isu ke 1 dengan rumusan isu : **Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.**

C. RANCANGAN JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

MATRIK JADWAL RENCANA KEGIATAN AKTUALISASI

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPT			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Mencari referensi terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik.																	
	a. Membaca dan Menyaring referensi yang terkait dengan isu-isu strategis yang menjadi bahan terjemahan dari media cetak ataupun elektronik.																	
	b. Melakukan konsultasi kepada atasan mengenai isu-isu																	

[illegible]

3.	Melakukan Koordinasi Dengan Sekretariat Yang Menangani Isu-Isu Strategis Yang Berpotensi Menjadi Topik Terjemahan																
	a. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang koordinasi yang akan dilakukan.																
	b. Mempersiapkan waktu dan tempat untuk koordinasi.																
	c. Melakukan koordinasi dengan sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan.																
	d. Membuat laporan dan analisis tentang hasil koordinasi dengan sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan.																
4.	Melakukan koordinasi dengan pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan Konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.																
	a. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang koordinasi yang akan dilakukan.																

BAGIAN III

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. MATRIK PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Mencari referensi terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membaca dan Menyaring referensi yang terkait dengan isu-isu strategis yang menjadi bahan terjemahan dari media cetak ataupun elektronik. ✓ Melakukan konsultasi kepada atasan mengenai isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. ✓ Membuat daftar dan ringkasan tentang berita yang memuat isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan hasil diskusi mengenai referensi isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. ✓ Daftar berita yang memuat isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan 	<p>(Komitmen Mutu) dibuktikan dengan penulis mengawali kegiatan dengan membaca dan menyaring referensi terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan dan membuat daftar dan ringkasan tentang berita yang memuat isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan sehingga penulis mengetahui peristilahan yang berterima untuk penerjemahan di lingkungan DPR RI.</p> <p>(Etika Publik) dibuktikan dengan penulis melakukan konsultasi kepada atasan mengenai isu-isu strategis yang telah dipilih.</p>	Mencari referensi terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik agar dapat meningkatkan kemampuan penerjemah dan mendukung visi Setjen dan BK DPR RI untuk menjadi instansi yang professional, andal, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI. Pencarian referensi terkait isu-isu internasional terkini menjadi penting karena hal ini dapat menambah ke-akuratan penerjemahan serta dapat mendukung fungsi DPR RI dalam melakukan kerja sama antar parlemen.	Melalui pencarian referensi terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik dapat memperkuat nilai Akuntabel, Profesional, Dan Integritas dalam diri penerjemah yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI

		✓ Membuat laporan hasil konsultasi tentang ringkasan berita yang memuat isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.		(Akuntabilitas) dibuktikan dengan penulis membuat laporan hasil konsultasi tentang ringkasan berita yang memuat isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.		
2.	Melakukan FGD (Focus Group Discussion) internal penerjemah Setjen DPR RI terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan konsultasi dengan mentor tentang FGD yang akan dilakukan. ✓ Mempersiapkan waktu dan tempat untuk FGD. ✓ Melakukan <i>Focus Group Discussion</i> internal penerjemah Setjen DPR RI terkait dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan.. ✓ Membuat laporan dan analisis tentang hasil FGD internal penerjemah Setjen DPR RI. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan hasil diskusi internal penerjemah lingkungan Setjen dan BK DPR RI. ✓ Laporan analisis hasil diskusi ✓ Foto hasil dokumentasi kegiatan. 	<p>(Etika Publik) dibuktikan dengan penulis mengawali kegiatan dengan melakukan konsultasi dengan mentor tentang koordinasi yang akan dilakukan .</p> <p>(Etika publik, Komitmen mutu) dibuktikan dengan penulis melakukan rapat koordinasi atau Focus Group Discussion (FGD) internal penerjemah di Setjen dan BK DPR RI dengan tujuan untuk tukar pendapat mengenai penerjemahan di lingkungan DPR RI sehingga hasil terjemahan menjadi lebih baik dan berterima.</p> <p>(Akuntabilitas, Komitmen mutu) dibuktikan dengan membuat laporan hasil diskusi dan laporan analisis mengenai</p>	Koordinasi yang baik antar penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI akan mendukung fungsi Setjen dan BK DPR RI dalam pengkoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.	Melalui FGD (Focus Group Discussion) internal penerjemah Setjen DPR RI terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan dapat memperkuat nilai Akuntabel, Profesional Dan Integritas dalam diri penerjemah yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI.

				isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Dalam laporan tersebut disertai dengan bukti dokumentasi berupa foto kegiatan.		
3.	Melakukan koordinasi dengan Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional selaku sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultasi dengan mentor tentang koordinasi yang akan dilakukan. ✓ Mempersiapkan waktu dan tempat koordinasi dengan Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional. ✓ Melakukan rapat koordinasi dengan Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional ✓ Membuat laporan dan analisis hasil koordinasi dengan Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan hasil diskusi dengan Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional selaku sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. ✓ Laporan analisis hasil diskusi terkait isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan ✓ Foto hasil dokumentasi kegiatan. 	<p>(Etika Publik) dibuktikan dengan mengawali kegiatan dengan melakukan konsultasi dengan mentor tentang koordinasi yang akan dilakukan.</p> <p>(Etika publik, Komitmen mutu, WoG) dibuktikan dengan melakukan rapat koordinasi dengan Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan, sehingga diharapkan hasil terjemahan menjadi lebih baik dan hubungan antar bagian dalam Biro KSAP DPR RI menjadi lebih harmonis.</p> <p>(Akuntabilitas, Komitmen mutu) dibuktikan dengan membuat laporan hasil</p>	koordinasi yang baik dengan bagian lain dalam Biro KSAP akan mendukung fungsi Setjen dan BK DPR RI dalam koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas, dan pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.	Melalui koordinasi dengan Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional selaku sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan dapat memperkuat nilai Akuntabel Dan Profesional dalam diri penerjemah sesuai dengan nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI.

				diskusi dan laporan analisis mengenai isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Dalam laporan tersebut disertai dengan bukti dokumentasi berupa foto kegiatan.		
4.	Melakukan koordinasi dengan Bp. Drs. Robert Juheng Purba selaku pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultasi dengan mentor tentang koordinasi yang akan dilakukan. ✓ Mempersiapkan waktu dan tempat koordinasi dengan Bp. Drs. Juheng Purba. ✓ Melakukan koordinasi dengan Bp. Drs. Robert Juheng Purba.. ✓ Membuat laporan dan hasil analisis koordinasi dengan Bp. Drs. Robert Juheng Purba. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan hasil koordinasi dengan Bp. Drs. Robert Juheng Purba selaku pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. ✓ Laporan analisis hasil diskusi terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. ✓ Foto hasil dokumentasi kegiatan 	<p>(Etika Publik) dibuktikan dengan mengawali kegiatan dengan melakukan konsultasi dengan mentor tentang koordinasi yang akan dilakukan.</p> <p>(Etika publik, Komitmen mutu) dibuktikan dengan melakukan koordinasi dengan Bp. Drs. Robert Juheng Purba selaku pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan sehingga diharapkan hasil terjemahan menjadi lebih baik dan hubungan antar pegawai dalam Biro KSAP DPR RI menjadi lebih harmonis.</p>	Koordinasi yang baik antara penerjemah dan pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan dapat mendukung visi Setjen dan BK DPR RI untuk menjadi instansi yang professional, andal, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.	Melalui koordinasi dengan Bp. Drs. Robert Juheng Purba selaku pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan dapat memperkuat nilai Akuntabel Dan Profesional dalam diri penerjemah sesuai dengan nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI.

				(Akuntabilitas, Komitmen mutu) dibuktikan dengan membuat laporan kegiatan dan laporan analisis mengenai isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Dalam pembuatan laporan disertai dengan bukti dokumentasi berupa foto kegiatan.		
5.	Melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil analisis kepada penerjemah Setjen dan BK DPR RI dan stakeholder terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Merapikan format hasil analisis isu. ✓ Mencetak hasil analisis isu. ✓ Memaparkan dan membagikan hasil analisis terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan kepada penerjemah dan stakeholder. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laporan hasil sosialisasi dan diseminasi kepada penerjemah dan stakeholder ✓ laporan analisis terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Komitmen mutu, dan WoG dibuktikan dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi laporan hasil analisis terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan kepada penerjemah di Setjen dan BK DPR RI, sehingga kualitas terjemahan menjadi lebih baik dan berterima dan hubungan antara penerjemah dan stakeholder menjadi lebih harmonis. ✓ Akuntabilitas dibuktikan dengan membuat laporan kegiatan disertai dengan hasil dokumentasi berupa foto kegiatan. 	Dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi laporan hasil analisis terkait isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan kepada penerjemah Setjen dan BK DPR RI dan stakeholder dapat mendukung visi Setjen dan BK DPR RI untuk menjadi instansi yang profesional, andal, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.	Melalui sosialisasi dan diseminasi hasil analisis kepada penerjemah Setjen dan BK DPR RI dan stakeholder terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan dapat memperkuat nilai Akuntabel, Profesional, Dan Integritas dalam diri penerjemah yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI.

B. Penjelasan Perubahan

Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan dalam kegiatan yang dilakukan untuk penyelesaian isu. Akan tetapi, terdapat sedikit perubahan per-istilah-an selama proses pelaksanaan aktualisasi, pada rancangan aktualisasi yang telah disusun sebelumnya disebutkan bahwa isu prioritas adalah “Masih kurangnya pengetahuan penerjemah DPR RI tentang isu-isu internasional terkini yang berpotensi menjadi bahan terjemahan” setelah dilakukan beberapa konsultasi dengan mentor dan coach, istilah “masih kurangnya” dianggap kurang tepat sehingga diubah menjadi “masih terbatasnya” dan “isu-isu internasional terkini” juga dianggap kurang tepat karena isu-isu terkini belum tentu menjadi bahan terjemahan di lingkungan DPR RI, atas saran mentor dan coach istilah tersebut diubah menjadi “isu-isu strategis” sehingga isu prioritas diubah menjadi “Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan”. Perubahan tersebut tidak mengubah tahapan kegiatan dan produk yang tercantum dalam rancangan aktualisasi yang telah disusun, sehingga kegiatan pelaksanaan aktualisasi ini menghasilkan 2 (dua) produk yaitu 1.) Laporan hasil aktualisasi yang berjudul “Peningkatan Pengetahuan Penerjemah Setjen dan BK DPR RI tentang Isu-Isu Strategis yang Berpotensi Menjadi Bahan Terjemahan” dan 2.) Laporan hasil analisis yang berjudul “Analisis Isu Strategis yang Berpotensi Menjadi Bahan Terjemahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI”

C. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

Secara umum, seluruh kegiatan berhasil dilaksanakan dan selesai sesuai target walaupun terdapat beberapa penyesuaian per-istilah-an. Produk yang dihasilkan dari aktualisasi ini adalah laporan hasil analisis mengenai isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sertarekomendasi kegiatan berupa (1.)Pelatihan penerjemahan di lingkup Setjen dan BK DPR RI yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan dan (2) pembuatan daftar istilah yang sering dipakai dalam tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI.

D. Analisis Manfaat dan Dampak

1. Manfaat

Kegiatan aktualisasi yang sudah dilakukan memberikan manfaat terhadap pemecahan isu.

a) Bagi Individu Peserta

Kegiatan aktualisasi yang berujuan untuk meningkatkan pengetahuan penerjemah Setjen dan BK DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan sangat bermanfaat karena di dalam tahapan pelaksanaan aktualisasi tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi peserta sebagai calon penerjemah di Setjen dan BK DPR RI terutama terkait dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan, mengingat peserta adalah calon penerjemah yang pemahaman tentang isu-isu penerjemahan di DPR RI masih sangat terbatas. Selain itu, kegiatan yang dilakukan juga dapat menjadi bekal calon penerjemah untuk mengimplementasikan apa yang sudah didapat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Output dari kegiatan aktualisasi ini adalah laporan hasil analisis tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sehingga penerjemah di lingkungan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mempunyai dasar pengetahuan tentang isu strategis yang berpotensi

menjadi bahan terjemahan terutama mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) dan diharapkan hasil terjemahan menjadi lebih baik dan berterima.

Dalam hal ini, rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan juga menerapkan komitmen mutu serta manajemen ASN karena terkait dengan peningkatan kompetensi. Selain itu, kegiatan ini juga mengaktualisasikan nilai WOG karena melibatkan unit dan instansi lainnya. Hal ini terlihat pada kegiatan diskusi dengan Bagian Sekretariat Kerja Sama Regional Biro KSAP DPR RI selaku sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan dan Bp Drs. Robert Juheng Purba selaku pejabat yang sering mengikuti konferensi internasional yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Pelaksanaan diskusi selain memberikan pengetahuan bagi peserta untuk meningkatkan kompetensinya juga dapat membiasakan diri untuk melakukan diskusi yang efektif dan efisien sesuai dengan mata pelatihan etika publik, komitmen mutu, dan WOG.

b) Bagi Pimpinan Langsung/ Unit Kerja

Pelaksanaan aktualisasi yang sudah dilakukan telah menghidupkan budaya *sharing knowledge* yang mencerminkan nilai WOG, etika publik, pelayanan publik serta komitmen mutu. Selain itu, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi unit kerja karena dapat meningkatkan kualitas penerjemahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

c) Bagi Unit Organisasi

Pelaksanaan aktualisasi yang sudah dilakukan dapat memperkuat nilai organisasi Setjen dan BK DPR RI yaitu akuntabel, profesional dan integritas.

d) Bagi Stakeholder

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilakukan juga memberikan manfaat bagi para stakeholder yaitu menunjang kinerja Dewan dengan lebih optimal karena kegiatan ini dapat meningkatkan keandalan *supporting system* anggota dewan seperti penerjemah melalui pengembangan kompetensi.

2. Dampak

Kegiatan aktualisasi ini memberikan dampak positif bagi calon penerjemah yaitu meningkatnya kompetensi penerjemah sehingga hasil terjemahan menjadi lebih baik dan berterima. Selain itu, dampak lain dari kegiatan ini adalah terbangunnya komunikasi yang sangat baik antara calon penerjemah, penerjemah senior dan stakeholder.

Pada setiap kegiatan yang dilakukan selalu menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Hal ini disebabkan, apabila nilai tersebut tidak diterapkan maka akan berdampak pada profesionalisme calon penerjemah dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta hasil terjemahan menjadi tidak maksimal.

E. Tantangan/Hambatan

Tantangan/hambatan yang muncul dalam setiap kegiatan yang sudah dilakukan adalah menyesuaikan jadwal dengan narasumber, sehingga timeline dari rancangan yang sudah disusun mengalami sedikit perubahan. Akan tetapi, secara keseluruhan hambatan tersebut dapat diatasi dengan menjaga komunikasi. Tantangan/hambatan tersebut tidak mempengaruhi penyelesaian isu dan output yang dihasilkan.

BAGIAN IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa diskusi yang telah dilakukan di tahapan aktualisasi, dapat disimpulkan bahwa isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan di lingkungan DPR RI sangat beragam dan kompleks mengingat DPR RI adalah lembaga politik yang terdiri dari berbagai komisi dengan permasalahannya masing-masing. Untuk mengatasi masalah tersebut maka penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI harus memahami struktur organisasi dan tugas-tugas dari instansi DPR RI dan instansi pendukungnya yaitu Setjen dan BK DPR RI. Secara garis besar isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan mengenai kerja sama antar parlemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan tujuan program Milenium Developmen Goals (MDGs) yang saat ini telah menjadi Sustainable Development Goals (SDGs). Penulis telah merangkum Isu tersebut dalam laporan analisis mengenai isu-isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan yang merupakan output dari pelaksanaan aktualisasi CPNS calon penerjemah.

B. Saran

Beberapa catatan yang dapat diambil dari rangkaian kegiatan aktualisasi seperti pencarian referensi dan koordinasi dengan sekretariat dan pejabat terkait mengenai peningkatan kompetensi penerjemah tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan adalah terdapat beberapa masalah yang dihadapi CPNS penerjemah Setjen dan BK DPR RI dalam melakukan tugas penerjemahan antara lain adalah CPNS penerjemah kurang memahami substansi tentang isu-isu yang menjadi bahan terjemahan dan kurang memahami tentang istilah-istilah yang harus dipakai dalam tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penerjemahan di Setjen dan BK DPR RI. Rekomendasi tersebut adalah diadakannya ***(1.)Pelatihan penerjemahan di lingkup Setjen dan BK DPR RI yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan*** dan ***(2) pembuatan daftar istilah yang sering dipakai dalam tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI.***

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEGIATAN 1



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

29 Mei 2018

Nomor : DP/ 440 /SETJEN DAN BK-DPRRI/AP.04/09/2018
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Yth.

1. Kepala Sub Bagian Alih Bahasa
 2. Pejabat Fungsional Penerjemah Ahli Madya
- Biro Kerja Sama Antar Parlemen Setjen dan BK DPR RI
Jakarta

Dengan hormat kami beritahukan, bahwa dalam rangka Habitiasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana kegiatan habituasi tersebut Melakukan koordinasi terkait pencarian referensi tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik, sehubungan dengan itu kami mengundang Bapak dan Ibu pada:

Hari, tanggal : Rabu, 30 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Bagian Set. Minluna
Acara : Koordinasi terkait pencarian referensi tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik

Atas perhatian dan kehadiran saudara kami mengucapkan terimakasih

Kabag Set. Administrasi
Kegiatan Luar Negeri Anggota

Sartomo, S.S., M.Si
NIP. 196808111996031001



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR HADIR

Tahun Sidang : 2017 - 2018
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : --
Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Rabu, 30 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB. - selesai.
Tempat : Ruang Rapat Bagian Set. Minluna
Gd. Nusantara III Lantai 6
Ketua Rapat : Sartomo, S.S., MSi
A c a r a : Koordinasi terkait pencarian referensi tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sartomo, S.S., MSi	Kepala Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	1.
2.	Elvira Dianti A., S.S., M.Si.	Kepala Subbagian Alih Bahasa	2.
3.	Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si	Penerjemah Madya	3.
4.	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.	Set. Minluna	4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

KEGIATAN 1

KOORDINASI TERKAIT PENCARIAN REFERENSI TERKAIT ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPOTENSI MENJADI BAHAN TERJEMAHAN MELALUI MEDIA CETAK ATAUPUN ELEKTRONIK.

Waktu Pelaksanaan : Rabu, 30 Mei 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Bagian Minluna
Gd. Nusantara III Lantai 6 DPR RI
Tahapan Kegiatan : 1. Membaca dan Menyaring referensi terkait dengan isu-isu strategis yang menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik.
2. Melakukan konsultasi kepada atasan mengenai isu-isu strategis yang menjadi bahan terjemahan.
3. Membuat daftar dan ringkasan tentang isu-isu strategis yang menjadi bahan terjemahan.
4. Membuat laporan tentang pembuatan referensi tentang isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

RINGKASAN

1. Kegiatan ini diawali konsultasi dengan mentor sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi jelas dan terarah;
2. Penulis mencari referensi terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan berdasarkan arahan mentor. Bp Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si. selaku mentor menyarankan untuk mencari berbagai referensi dan berita mengenai MDGs dan SDGs.
3. Setelah menemukan berbagai referensi dan berita, penulis lalu berkonsultasi dengan atasan yaitu Kasubag Alih Bahasa yaitu Ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si. dan Kabag Set. Minluna yaitu Bapak Sartomo, S.S, M.Si.
4. Diskusi dipimpin oleh Sartomo, S.S, M.Si. selaku Kabag Set. Minluna di Biro KSAP Setjen dan BK DPR RI dan diikuti oleh Ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si. selaku Kasubag Alih Bahasa dan Yudi Chandri Setiawan, S.Pd sebagai penulis.
5. Diskusi lebih ter-fokus pada peningkatan kualitas penerjemahan terutama untuk CPNS calon penerjemah yang menurut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum;
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi;
 - Melakukan penerjemahan lisan para interpreting.
6. Diskusi diawali dengan pemaparan dari Yudi Chandri Setiawan, S.Pd mengenai referensi dan berita yang telah dicari terkait dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.
7. Setelah mencermati pemaparan dari penulis, mentor dan atasan memberikan tanggapan dan masukan mengenai referensi yang telah dipaparkan. Dari hasil diskusi tersebut, atasan dan mentor memberikan saran untuk lebih memperhatikan isu yang kaitan nya lebih erat dengan

kinerja DPR RI dan mencatat istilah-istilah penting yang mungkin dipakai dalam proses penerjemahan.

8. Mentor juga menambahkan untuk mendalami isu terkait dengan MDGs dan SDGs yang dinilai sangat berpotensi menjadi bahan terjemahan.
9. Setelah diskusi dirasa cukup, ketua rapat menyampaikan kesimpulan dari diskusi dan penulis memperbaiki hasil pencarian referensi atas dasar masukan dari mentor dan atasan. Jika dirasa perlu akan diadakan diskusi lagi di lain kesempatan, terakhir ditutup dengan doa.

Mengetahui,
Mentor



Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si.
NIP. 19701105 199703 1 007

Jakarta, 30 Mei 2018
Peserta Latsar CPNS,



Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
NIP. 19911223 201803 1 001

Foto Kegiatan 1



Foto 1.1 Konsultasi dengan mentor mengenai pencarian referensi terkait isu – isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik.



Foto 1.2 Konsultasi dengan Kabag Minluna dan Kasubag Alih Bahasa mengenai pencarian referensi terkait isu – isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik.

Indonesia, Austria to Further Cooperation

24-05-2018 / B.K.S.A.P.

Deputy Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Juliari P. Batubara, led a delegation paying a working visit to Austria to improve bilateral trade balance between the two countries. The relation, established since 1954, was expected to boost economic and political cooperation. 0

Batubara said the long term relationship between Indonesia and Austria was marked by exchanging visits frequently at the government and parliament levels. In the political cooperation, the two countries have supported each other for their candidacies in UN organs and other international organizations.

“For example, Austria supported Indonesia’s candidacy for non-permanent member of the UN Security Council for 2019-2020 period. In return, Indonesia supported Austria’s candidacy for the non-permanent member of the UN Security Council for 2027-2028 period,” Batubara said in Viena, Austria, Tuesday (22/5/2018). Rofi’ Munawar, Vice Chairman of BKSAP, was also among the 12 visiting members of BKSAP.

In the economic cooperation, Batubara added, Indonesia had exported furniture, handicrafts, and raw materials, while Indonesia imported machineries and auto spare parts, electronics, processed products, and chemical products.

In tourism, he also explained the current domestic situation and condition relating to terrorism, saying that Indonesia’s current situation was under control and was safe for tourists.

In addition, Batubara said opportunities for private sector’s investment is wide open. Indonesia, he added, was pushing infrastructure projects ranging from highways, ports, airports, to power plants, which need huge investment.

During the visit to Austria, BKSAP delegation paid visits to Austria’s parliament, Ministry of Transportation, Innovation, and Technology, and Siemens Mobility. The delegation had the opportunity to observe the train assembly line from train body frame making to complete train form.

During the visit, Director of Sales Siemens Mobility Christoph Masopust said his willingness to participate in the transportation development in Indonesia, especially mass railway transportation.

In response to that, Member of BKSAP Rachel Maryam said the House would follow up the cooperation opportunity to Indonesian government, while asking Siemens to give competitive price. She also reminded that the cooperation would not cause any domestic employment problem, such as the influx of foreign labors.

For this part, Masopust said Austria was willing to negotiate to reach agreement on matters related to financial, labors, and technology transfer.
(ann/sf-mut)

Source:

[http://www.dpr.go.id/en/berita/detail/id/20867/t/Indonesia%2C+Austria+to+Further+Cooperation+](http://www.dpr.go.id/en/berita/detail/id/20867/t/Indonesia%2C+Austria+to+Further+Cooperation)

Wednesday, May 30 2018

India – RI: Indo – Pacific strategic partners



May 30 marks a historic meeting between Indian Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Joko “Jokowi” Widodo. Modi’s first bilateral visit to Indonesia lends further credence to India’s “Act East” policy that seeks to build closer relations with East Asian Countries. Ever since the policy was introduced as “Look east” in 1991, East Asia has undergone a sweeping change.

Although the East Asian economies had by then been growing at a steady pace, the strategic picture was becoming uncertain. China was opening up its economy amid domestic political disturbances, while the Soviet Union was collapsing. This left the United States as the only great power, defining the global order for the next decade.

The 1990s thus emerged as a decade of American intervention from the Balkans to the Middle East. In the Libyan and Syrian conflicts in the 2010s, however, war-weary America was hard-pressed to pursue the interventionist role it once assumed. It was Russia, and not the US, that most overtly intervened in Syria.

America’s strategic fatigue is another power’s vigor. While America was then busy in the Middle East, China began challenging American superiority in the Pacific. What began as China’s search for prosperity has now become a search for security.

China’s demand for overseas markets and resources has driven Beijing’s military presence further east and south in the Pacific, and west into the Indian Ocean.

For China’s economic security is utterly dependent on Beijing’s ability to secure markets and sea lanes that traverse the Indian and Pacific – the Indo – Pacific.

Where China expands, however, other powers may get squeezed, and this includes India in the Indian Ocean. Issues over the land border and human rights, such as in Tibet, are only symptoms of the ills in Sino-Indian relations. The crux lies in the management of strategic space.

Control over access and dominance in the Indian Ocean and its islands, as well as countries around its periphery, is fundamental to India’s survival. Unless India is able to dominate the Indian subcontinent and its maritime approaches, foreign powers could fill the void at India’s expense.

Of course, other great powers also maintain a military presence in the Indian Ocean, such as the US and the Soviet Union in the 1970s and 1980s. Yet the Indian Ocean for both military super powers was only a strategic space of secondary importance. Their primary focus areas remained on the European continent and in the north Atlantic and north Pacific.

Without access to the Indian Ocean, however, China cannot grow. China's greater control over the Indian Ocean sea lanes could open up a second front to outflank India from the west and south. For China's inroads into the subcontinent, primarily through the Belt and Road Initiative (BRI), could reduce India's diplomatic and strategic leverage by overwhelming India's influence in such countries as Sri Lanka and the Maldives.

Most critically, perhaps, is China's help for Pakistan to arm itself against India, and which thus condemns Delhi to fixate its strategic attention perpetually land bound to northwest.

This why India's sheer proximity to China on land makes India's strategic anxiety at sea so acute. Land skirmishes, such as the 2017 Doklam standoff, could impede India's effort in expanding its own maritime power and influence, and gradually erode India's own dominance in the Indian Ocean.

The Indian Navy has grown into a blue-water fleet, but its current resources and pace of modernization still lag behind those of China. While India made several maritime forays into the Western Pacific, aided by strategic partners such as Vietnam and Japan, Delhi has barely achieved the level of influence that Beijing has commanded in the Indian Ocean.

Between Delhi and Beijing lies Jakarta. Control over the Indo-Pacific requires control over the Indonesian archipelago. Indonesia has thus become a new battleground of Sino-Indian rivalry. China's successful courting of Indonesia could frustrate India's own efforts to counterbalance China in the western Pacific.

Luckily for Delhi, Jakarta has no wish to be anyone's second fiddle. Hence this is why the Modi-Jokowi meeting commands great importance not just for India-Indonesia relations but also for the course of great power politics in the Indo-Pacific.

For Jakarta, the BRI offers a pragmatic away out of its economic malaise due to chronic infrastructure shortages.

Beyond economics, however, Jakarta shows little sign of ingratiating itself further with Beijing's charm offensive.

Instead, Jakarta launched its own "Global Maritime Fulcrum" (GMF) concept that seeks to transform the archipelago beyond a mere gateway of the Indo-Pacific. The concept fits neatly with India's "Act East" policy. Indonesia's efforts to play a key role in the Indian Ocean would be meaningless without India's support.

By the same token, India's eastward diplomacy toward the Pacific would be tactless without Indonesia's input.

This congruence of interests should drive both countries to elevate defense cooperation; an area where the two countries can signal intent to solidify relations with relatively modest investments.

As part of the naval "India-Indonesia coordinated patrols" (Ind-Indo Corpat), the two countries could initiate routine aerial maritime surveillance along the six Degree Channel from the Indonesian and Indian naval air bases in Sabang and Campbell Bay, respectively. Both countries could also expand the complexity of bilateral military exercises to include anti-submarine warfare and air combat simulation.

Indonesia's pursuit of defense industrial capacity should become India's opportunity to offer its expertise. India could provide service facilities for Indonesia's fleet of Russian-made aircraft, including the Sukhoi, which India also operates. Joint research collaboration in the development of missile technology and unmanned vehicles is a possibility the two countries should seriously consider.

But such prospects of cooperation are doubtful at best without personal intervention from the leaders of both nations. Whatever the Indian and Indonesian government commit to during the their bilateral summit.

Source: Jakarta Post

DPR Committed to support the UN Human Right Council reform

21-06-2018 / B.K.S.A.P.

Evita Nursanty, a Member of the Committee of Inter Parliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives, was disappointed with US's decision to withdraw from the UN Human Right Council (UN HRC). She believed that the UN HRC served as a multilateral cooperation forum, as well as the international community's proof of commitment to uphold and advance human rights protection.

This was stated following US' decision to withdraw from the Council as it was announced by the US State Secretary Michael Richard Pompeo and US Ambassador to UN Nikki Haley at a Press conference Monday afternoon local time.

"Indonesia deeply regret US's decision to withdraw from HRC, particularly when it was just based on US' support of Israel, while the International Community are still debating over this issue. Indonesia keeps supporting the reform in the UN HRC and in other UN Agencies and believes that the process will need support from its member states by staying in the HRC," Evita said in a press release on 20 June 2018.

She stated that the UN HRC is important for those weak communities in all over the world to get protected from various human rights violations.

With US withdrawing, shredded, the international community will question the commitment of the super-power country, who wanted to be a global leader in promoting and protecting the human rights and peace as well as prosperity all over the world.

"Moreover, before its withdrawing, US administration has also withdrawn from other multilateral process or mechanism such as the Paris Agreement, UNESCO, Global Compact Migration, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on the Iranian Nuclear deal," she added.

She admitted, the UN HRC's performance has not been satisfying, but the reform process, as required of several other UN agencies such as UN Security Council and UN General Assembly, needs political and multilateral cooperation commitment from all UN member states.

Therefore, she supports the step taken by the Indonesian Government along with other countries to continue contributing and cooperating in upholding and advancing the human rights protection, through multilateral cooperation, according to the mandate of the UN HRC, including strengthening the UN HRC performance.

“We give our support to the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia to uphold and promote the protection of human rights through multilateral cooperation and strengthening the UN HRC performance,” she said. (ann/sf-muiz)

Source:

<http://www.dpr.go.id/en/berita/detail/id/21100/t/DPR+Committed+to+support+the+UN+Human+Right+Council+reform>

Shooting Dead Paramedic Razan, Israel Violates International Law

05-06-2018 / B.K.S.A.P.

Deputy Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) of the House of Representatives Rofi Munawar considered Israel to have committed a planned murder of the Palestinian paramedic Razan Al Najjar. They continued to kill the Palestinians from a variety of professions and backgrounds.

"Israel is like carrying out a massacre on behalf of the state and on the pretext of self-defense, the Zionist state kills anyone who stands before them, children, mothers, journalists and nurses," Rofi Munawar said in a press release addressed to media on Tuesday (05/06/2018) in Jakarta.

Razan al-Najjar, a Palestinian volunteer nurse in charge of the Gaza Strip, was shot dead by Israeli soldiers on Friday (01/06/2018). Razan's death adds to the list of Palestinians killed by Israeli bullets, a total of 124 by the end of March. Since March 30, 2018, residents in the Gaza Strip protested at the Israeli border demanding the return of their land after being expelled and fleeing during the war in 1948.

"The protest by Palestinians to commemorate the nakba (land) day at the border of Gaza and the transfer of the US ambassador to Jerusalem has undoubtedly caused Israel to go berserk. Many victims have fallen, but the world remains silent for the countless time," slammed the member representative of the Prosperous Justice Party faction.

The East Java legislator added that, Razan at the time wore medical attributes and was in a non-threatening position. And yet the Israeli army still fired shots at the 21-year-old woman. For the shooting, Israel should be punished severely for violating the 1949 Geneva Conventions.

"The convention asserted that paramedics to be protected when trying to save those who are wounded in the conflict," he said.

Stipulation on the protection of health workers in the battlefield can be found in the articles of the Geneva Conventions and their additional Protocols. For example, as provided for in Articles 11, 24-27, 36 and 37 of the Geneva Conventions, health workers shall be respected and protected in all circumstances. (hs/sc-chan)

Source:

<http://www.dpr.go.id/en/berita/detail/id/21029/t/Shooting+Dead+Paramedic+Razan%2C+Israel+Violates+International+Law>

Indonesian House Enhance Partnership with Pacific Region

23-07-2018 / B.K.S.A.P.

Vice Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) of the Indonesian House of Representatives, Juliari Batubara, confirmed that the House will continue to enhance partnership with several countries in the Pacific Region. It is important to increase various feasible potentials, such as blue economy, human development, and sustainable biodiversity.

Batubara said that the Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) event held in Jakarta, July 23-24, 2018, was aimed to strengthen the relationship between Indonesia and Pacific Region countries, which is something that has not been fully pursued.

"Through this IPPP event, we hope that there will be closer partnership between Indonesia and Pacific. So far, the cooperation with the Pacific countries is less of a concern," said Batubara during the IPPP forum in Jakarta, Monday (23/07/2018).

The Indonesian Democratic Party of Struggle politician said this forum play a role to promote partnership between parliaments, not only diplomatic but also economic partnership.

Another aspect, Batubara also requested the Pacific countries to support the sovereignty of Papua as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), because global issues related to Papua can be resolved regionally.

"Papua is a part of NKRI, and of course it is part of our concern to continue and gain support for the sovereignty of Papua as part of NKRI and this cannot be separated from the partnership relation with Pacific countries," Batubara added.

In this connection, the Member of Commission VI (trade, industry, investment) of the Indonesian House of Representatives added that Indonesia's relations with Pacific Region countries should be sustainable.

The Pacific Ocean is no longer a separator between Indonesia and the Pacific countries. It has turned into a unifying medium for strengthened relationship in the future. (hs/sf-chan)

Source:

<http://www.dpr.go.id/en/berita/detail/id/21417/t/Indonesian+House+Enhance+Partnership+with+Pacific+Region>

WPFSD Promotes Women's Role in Renewable Energy

12-09-2018 / B.K.S.A.P.

The role of women in energy consumption became one of the themes at the 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD). Meanwhile, the main theme of the meeting was "Partnership Towards Sustainable Energies for All".

"One of the themes at The 2nd World Parliamentary Forum is sustainable energies for all. As we all know, the use of fossil energy is alarming. The Indonesian House of Representatives, therefore, initiates the theme of sustainable energies for all," said Nurhayati Ali Assegaf, Chairperson of Committee for Inter-Parliamentary Cooperation (BKSAP) on 12 September 2018 in Bali.

She said one of the reasons why the Committee chose the theme of women participation in energy was because of their dominant roles in household energy consumption. In addition, there are more women willing to innovate by recycling discarded items.

"We hope, through the theme of women participations, we can persuade people all over the world to acknowledge that women's participation in renewable energy is very important," said the Democrat Party Faction politician.

Nurhayati said the forum also invites Indonesian government representatives to present their programs and roles. The Indonesian House wants to show that the government will not be able to realize the sustainable development goals on their own, neither will the legislature.

"We do need synergy and coordination. We hope this achievement will result not only in an international roadmap, but also a legislation enacted by the House. Afterwards, we can provide the budget for the roadmap," said the lawmaker from East Java constituency.

Therefore, Indonesia is proud to host the 2nd World Parliamentary Forum because it is the implementation of parliamentary diplomacy, especially in supporting the government's foreign policy, and more specifically the renewable and sustainable energy issues. (dep/sf/mut)

Source:

<http://www.dpr.go.id/en/berita/detail/id/22068/t/WPFSD+Promotes+Women%E2%80%99s+Role+in+Renewable+Energy>

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Kegiatan 1 : Mencari referensi terkait isu-isu strategis yang menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Memilah-milah bidang-bidang dalam isu strategis	fl
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Bidang-bidang isu strategis terkait memiliki istilah penting dalam penerjemahan	fl
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Terdapat keterkaitan antara Substansi dengan Mata Pelatihan.	fl
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Terdapat kontribusi untuk Tusi karena berkaitan erat dengan proses penerjemahan	fl
Penguatan Nilai Organisasi	Dapat meningkatkan profesionalisme	fl

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

- 1) Kegiatan 1 : Mencari referensi terkait isu-isu strategis yang menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Mengaring informasi, konsultasi dengan senior sampai menyusun daftar OK Filadela.	Proses 070618
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Memperluas penyusunan daftar terkait isu internasional OK -	Proses
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kompetensi Mutu, Etika Publik, Akuntabilitas OK -	Proses
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Peningkatan kemampuan penerjemahan OK -	Proses
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel dan Profesional menjadi dasar OK	Proses

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

- 1) Kegiatan 1 : Mencari referensi terkait isu-isu strategis yang menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Mengaring informasi, konsultasi dengan senior sampai menyusun daftar OK Filadela.	Presentasi 070618
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Memperluas penyusunan referensi terkait isu internasional OK -	Presentasi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kompetensi Mutu, Etika Publik, Akuntabilitas OK -	Presentasi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Peningkatan kemampuan Penerjemah OK -	Presentasi
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel dan Profesional menjadi dasar OK	Presentasi

LAMPIRAN KEGIATAN 2



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 441/AP.04/07/2018

2 Juli 2018

Sifat : Penting

Derajat: Segera

Perihal : **Undangan**

Yth.

1. Kasubag Alih Bahasa;

2. Para Pejabat Fungsional Penerjemah

Biro Kerja Sama Antar Parlemen Setjen dan BK DPR RI

Jakarta

Dengan hormat kami beritahukan, bahwa dalam rangka Habitiasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka kami akan mengadakan rapat koordinasi internal penerjemah di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	: Kamis, 5 Juli 2018
Waktu	: Pukul 10.00 - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat AIPA Gd. Nusantara III DPR RI Lt. 4
Acara	: Konsultasi isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan

Atas perhatian dan kehadiran Saudara kami mengucapkan terima kasih

PLH Kabag Set. Administrasi
Kegiatan Luar Negeri Anggota

Aan Yulianingsih, S.Sos.
NIP. 196512011988032001



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Tahun Sidang : 2017 - 2018
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : --
Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Kamis, 5 Juli 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB. - selesai.
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III Lantai 6
Ketua Rapat : Aan Yulianingsih, S.Sos
A c a r a : 1. Rapat Konsultasi isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan
2. Lain-lain.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sartomo, S.S.M.Si	Kabag Set. Minluna	
2.	Aan Yulianingsih, S.Sos.	Kasubag Penyiapan Adm	
3.	Elvira Dianti A., S.S., M.Si.	Kasubag Alih Bahasa	
4.	Murniwati Ermilya	Set. Minluna	
5.	Andriani Sofiati	Set. Minluna	
6.	Umiati, S.Sos.	Set. Minluna	
7.	Rusli Muhammad Jein	Set. Minluna	
8.	Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si	Set. Minluna	
9.	Novri Helmawan, S.Pd.	Set. Minluna	
10.	Martrisa Canda Chaniago, S.PD.	Set. Minluna	
11.	Andriaji Gumilar Laksana P., S.S.	Set. Minluna	
12.	Nurul Muttaqin, S.S.	Set. Minluna	
13.	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.	Set. Minluna	
14.	Abdul Muiz, S.Pd.	Set. Minluna	



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 432/ 5715 925, WEBSITE:
www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
KEGIATAN 2
MELAKUKAN FGD (FOCUS GROUP DISCUSSION) INTERNAL PENERJEMAH
SETJEN DPR RI TERKAIT DENGAN ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPOTENSI
MENJADI TOPIK TERJEMAHAN**

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 5 Juli 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III Lantai 6 DPR RI
Tahapan Kegiatan : 1. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang FGD yang akan dilakukan.
2. Mempersiapkan waktu dan tempat untuk FGD.
3. Melakukan *Focus Group Discussion* internal penerjemah Setjen DPR RI terkait dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan.
4. Membuat laporan dan analisis tentang hasil FGD internal penerjemah Setjen DPR RI.

RINGKASAN

1. Kegiatan ini diawali konsultasi dengan mentor sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi jelas dan terarah;
2. Setelah berkonsultasi dengan mentor dan Kasubag Alih Bahasa tentang Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilakukan, disetujui bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 10.00 WIB – selesai adalah waktu diadakannya FGD internal penerjemah di lingkungan Setjen DPR RI. Rapat tersebut bertempat di ruang rapat AIPA di Gedung Nusantara III Lantai 6 DPR RI.
3. FGD dipimpin oleh Ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si. selaku Kasubag Alih Bahasa di Bagian Minluna Biro KSAP Setjen dan BK DPR RI. Diskusi tersebut diikuti oleh 7 (tujuh) Pejabat Fungsional Penerjemah di lingkungan Setjen DPR RI, yang terdiri dari 1 (satu) Penerjemah Ahli Madya yaitu Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si., 2 (dua) Penerjemah Ahli Muda yaitu Bp. Novri Helmawan, S.Pd. dan Ibu Martrisa Canda Chaniago, S.Pd., 1 (satu) Penerjemah Ahli Pertama yaitu Bp. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S., dan 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) calon penerjemah yaitu Abdul Muiz, S.Pd, Nurul Muttaqin, S.S., dan Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
4. Diskusi lebih ter-fokus pada peningkatan kualitas penerjemahan terutama untuk CPNS calon penerjemah yang menurut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum;
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi;

- Melakukan penerjemahan lisan para interpreting.
5. Diskusi diawali dengan pemaparan dari CPNS yang juga merupakan calon penerjemah yaitu dari Abdul Muiz, S.Pd dan Yudi Chandri Setiawan, S.Pd. tentang Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dan tugas- tugas CPNS di tahap habituasi yang mewajibkan CPNS untuk menerapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaan sehari-hari di lingkungan kerja. Setelah memaparkan sedikit tentang Latsar, dilanjutkan dengan kegiatan inti dalam diskusi ini yaitu keluh kesah CPNS tentang kesulitan dalam menerjemahkan bahan terjemahan karena masih terbatasnya pengetahuan CPNS calon penerjemah tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.
 6. Dalam pertemuan tersebut para penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI bertukar pendapat dan pengalaman tentang penerjemahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dan membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan, diskusi tersebut diawali dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh CPNS calon penerjemah.
 7. Pembahasan menjadi lebih mengerucut tentang istilah-istilah yang sering dipakai dalam penerjemahan terutama di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Berdasarkan pengalaman Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si selaku penerjemah paling senior di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, menurut beliau topik bahasan yang sering keluar dalam penerjemahan adalah isu tentang Millenium Development Goals (MDGs) yang saat ini diteruskan dengan program yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu bahasan mengenai SDGs adalah acara *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) yang akan diselenggarakan oleh BKSAP DPR RI. Kegiatan tersebut membahas tentang *Human Development and Maritime Sustainability*, jadi penerjemah harus memahami tentang isu-isu terkait.
 8. Selain pandangan dari Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si, Ibu Martrisa Canda Chaniago, S.Pd juga memberikan masukan bahwa penerjemah di lingkungan Setjen DPR RI harus paham substansi tentang “Women empowerment” karena bahasan tersebut sering disebut dalam pembahasan tentang kerja sama antar parlemen.
 9. Bp. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S. menambahkan bahwa dalam penerjemahan, kesalahan yang paling banyak dilakukan penerjemah adalah menerjemahkan dari kata per kata atau “word by word translation” tanpa memperhatikan konteks keseluruhan kalimat, hal – hal tersebut yang sering membuat hasil terjemahan menjadi rancu. Berdasarkan pengalaman penerjemah senior, diharapkan penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mampu paham substansi tentang isu-isu strategis sehingga dapat menerjemahkan berdasarkan konteks atau “Context based translation”.
 10. Setelah diskusi dirasa cukup, pemimpin rapat menyampaikan kesimpulan FGD hari ini dan jika dirasa perlu akan diadakan diskusi lagi di lain kesempatan, terakhir ditutup dengan doa.

Mengetahui,
Mentor



Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si.
NIP. 19701105 199703 1 007

Jakarta, 6 Juli 2018
Peserta Latsar CPNS,



Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
NIP. 19911223 201803 1 001

Foto Kegiatan 2



Foto 2.1 FGD (Forum Group Discussion) internal penerjemah Setjen dan BK DPR RI terkait dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.



Foto 2.2 FGD (Forum Group Discussion) internal penerjemah Setjen dan BK DPR RI terkait dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

LAPORAN ANALISIS

KEGIATAN 2

FGD (FOCUS GROUP DISCUSSION) INTERNAL PENERJEMAH SETJEN DPR RI TERKAIT DENGAN ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPOTENSI MENJADI TOPIK TERJEMAHAN.

RINGKASAN MASALAH

Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian kegiatan yang disusun penulis dalam kegiatan habituasi dan aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaan sehari-hari di instansi terkait. Penulis adalah CPNS yang akan menjadi Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) di Setjen dan BK DPR RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengertian Jabatan Fungsional penerjemah adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pengertian Penerjemah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan baik tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penerjemah mempunyai tugas pokok melakukan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalih aksaraan, dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan. Ditinjau dari segi arti, pengertian penerjemahan adalah mengganti makna bahasa asal ke dalam bahasa sasaran. Dilakukan dari format bahasa pertama ke format bahasa kedua secara struktur semantik. Dimaksudkan untuk yang sudah diubah dan harus secara tetap.

Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mempunyai peran yang penting karena di tempatkan di Biro Kerjasama Antar Parlemen (Biro KSAP) yang berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) pasal 182 menjelaskan bahwa Biro KSAP) mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa. Berkaitan dengan hal tersebut, CPNS penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI dikarenakan selain harus paham mengenai aturan kebahasaan dari bahasa asal ke bahasa sasaran (alih bahasa), penerjemah di lingkungan DPR RI juga harus memahami substansi dan isu-isu yang menjadi bahan terjemahan. CPNS penerjemah di Setjen DPR RI merasa kurang memahami substansi tentang isu-isu yang menjadi bahan terjemahan di lingkungan DPR RI terutama mengenai isu-isu strategis yang

berkaitan dengan kerjasama antar parlemen. Berdasarkan masalah yang muncul, penulis selaku CPNS penerjemah di Setjen dan BK DPR RI memandang perlu untuk diadakannya FGD (Focus Group Discussion) internal penerjemah Setjen DPR RI terkait dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa diskusi ini akan sangat penting bagi CPNS penerjemah karena akan terjadi pembagian informasi dan tukar pendapat dari penerjemah senior yang telah memiliki banyak pengalaman yang terkait dengan penerjemahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sehingga kualitas terjemahan menjadi lebih baik dan lebih berterima.

ANALISIS HASIL DISKUSI

Diskusi lebih ter-fokus pada peningkatan kualitas penerjemahan terutama untuk CPNS calon penerjemah yang menurut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: (1) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik; (2) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum; (3) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi; (4) Melakukan penerjemahan lisan para interpreting.

FGD dipimpin oleh ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si. selaku Kasubag Alih Bahasa di Bagian Minluna Biro KSAP Setjen dan BK DPR RI. Diskusi tersebut diikuti oleh 7 (tujuh) Pejabat Fungsional Penerjemah di lingkungan Setjen DPR RI, yang terdiri dari 1 (satu) Penerjemah Ahli Madya yaitu Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si., 2 (dua) Penerjemah Ahli Muda yaitu Bp. Novri Helmawan, S.Pd. dan Ibu Martrisa Canda Chaniago, S.Pd., 1 (satu) Penerjemah Ahli Pertama yaitu Bp. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S., dan 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) calon penerjemah yaitu Abdul Muiz, S.Pd, Nurul Muttaqin, S.S., dan Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.

Dalam diskusi tersebut penerjemah senior di lingkungan Setjen DPR RI RI menyampaikan pengalaman tentang penerjemahan di lingkungan DPR RI. Menurut Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si selaku penerjemah paling berpengalaman di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menyampaikan bahwa penerjemah di lingkungan DPR RI harus memahami terlebih dahulu tentang struktur organisasi baik tentang instansi DPR RI dan organisasi pendukungnya yaitu Setjen dan BK DPR RI. Setelah memahami struktur organisasi tersebut penerjemah juga harus memahami istilah-istilah yang sering dipakai dalam penerjemahan di lingkungan DPR RI. Beliau juga mengatakan bahwa penerjemah senior pun sering mengalami kesulitan dalam menerjemahkan karena bahasan terjemahan di DPR RI sangat kompleks dan selalu berubah-ubah menyesuaikan bahasan yang paling aktual terutama yang berkaitan dengan politik yang berhubungan dengan hubungan antar parlemen. Dengan adanya diskusi seperti ini akan mempermudah para penerjemah di DPR RI untuk sharing pengalaman dan bertukar pendapat tentang penerjemahan berkaitan dengan isu-isu terkait.

Pembahasan menjadi lebih mengerucut tentang istilah-istilah yang sering dipakai dalam penerjemahan terutama di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Berdasarkan pengalaman Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si selaku penerjemah paling senior di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, menurut beliau salah satu topik bahasan yang sering keluar terkait dengan isu kerjasama internasional dalam penerjemahan adalah isu tentang Millenium Development Goals (MDGs), karena program MDGs sudah selesai pada tahun 2015 dan masih terdapat beberapa target yang belum tercapai, maka program tersebut diteruskan dengan program yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Program SDGs adalah lanjutan dari MDGs yang tujuannya adalah menyelesaikan target MDGs yang belum tercapai. Salah satu acara yang diselenggarakan BKSAP DPR RI yang membahas salah satu tujuan dari SDGs adalah *Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)* yang membahas tentang *Human Development and Maritime Sustainability* dan menjalin kerja sama antar Negara-negara pasifik dengan Republik Indonesia terutama tentang ekonomi kelautan atau yang sering disebut dengan *Blue Economy*, berkaitan dengan hal tersebut penerjemah di lingkungan Setjen DPR RI akan dilibatkan dalam acara tersebut dan diharapkan mampu memahami tentang isu-isu terkait.

Selain pandangan dari Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si, Ibu Martrisa Canda Chaniago, S.Pd juga memberikan masukan bahwa penerjemah di lingkungan Setjen DPR RI harus paham substansi tentang “Women empowerment” karena bahasan tersebut sering disebut dalam pembahasan tentang kerja sama antar parlemen. Bp. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S. menambahkan bahwa dalam penerjemahan, kesalahan yang paling banyak dilakukan penerjemah adalah menerjemahkan dari kata per kata atau “word by word translation” tanpa memperhatikan konteks keseluruhan kalimat, hal – hal tersebut yang sering membuat hasil terjemahan menjadi rancu. Berdasarkan pengalaman penerjemah senior, diharapkan penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mampu paham substansi tentang isu-isu strategis sehingga dapat menerjemahkan berdasarkan konteks atau “Context based translation”.

Berdasarkan bahasan dalam diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan di lingkungan DPR RI sangat beragam dan kompleks mengingat DPR RI adalah lembaga politik yang terdiri dari berbagai komisi dengan permasalahannya masing-masing. Untuk mengatasi masalah tersebut maka penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI harus memahami struktur organisasi dan tugas-tugas dari instansi DPR RI dan instansi pendukungnya yaitu Setjen dan BK DPR RI. Secara garis besar isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan mengenai kerja sama antar parlemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan tujuan program MDGs yang saat ini telah menjadi SDGs.

REKOMENDASI

Beberapa catatan yang dapat diambil dari FGD internal penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI adalah terdapat beberapa masalah yang dihadapi CPNS penerjemah Setjen dan BK DPR RI dalam melakukan tugas penerjemahan antara lain adalah CPNS penerjemah kurang memahami substansi tentang isu-isu yang menjadi bahan terjemahan dan kurang memahami tentang istilah-istilah yang harus dipakai dalam tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penerjemahan di Setjen dan BK DPR RI. Rekomendasi tersebut adalah diadakannya *(1.) Pelatihan penerjemahan di lingkup Setjen dan BK DPR RI yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan* dan *(2) pembuatan daftar istilah yang sering dipakai dalam tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI.*

Mengetahui,
Mentor



Fusrudin Arief Budiman, SS, M.Si.
NIP. 19701105 199703 1 007

Jakarta, 6 Juli 2018
Peserta Latsar CPNS,








Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
NIP. 19911223 201803 1 001

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Kegiatan 2: Melakukan FGD (Focus Group Discussion) internal penerjemah Setjen DPR RI terkait dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Mulai melaksanakan bidang stay aktivator yang akan dilakukan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Menyeleksi/melaksanakan tahap 1 dari rencana kegiatan yg telah disusun	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	terdapat keterkaitan antara Substansi dengan mata Pelatihan	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Untuk kelancaran & Pross dalam Penerjemahan	
Penguatan Nilai Organisasi	Dapat meningkatkan profesionalisme	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

- 2) Kegiatan 2: Melakukan FGD (Focus Group Discussion) internal penerjemah Setjen DPR RI terkait dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Tahapan FGD sudah berjalan baik, dapat dilanjutkan.	Persentor 29/06/18 mdh
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Analisis diskusi OK	mdh
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Komitmen Mutu, B. P. Akuntabilitas	mdh
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Peningkatan Kualitas Layanan, pakekat Visi & Misi Organisasi	mdh
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel, Profesional, Integritas	mdh

LAMPIRAN KEGIATAN 3



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : DP/13211/SETJEN DAN BK-DPRRI/AP.04/07/2018 3 Agustus 2018
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Perihal : Undangan

Yth.

1. Plh. Kepala Bagian Kepegawaian, dan
 2. Kabag Set. Kerja Sama Organisasi Regional
- Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**
Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen Setjen dan BK DPR RI dan untuk memenuhi tahap Habitulasi yang mengharuskan Calon PNS dalam menerapkan nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja, maka Bagian Set. Minluna BKSAP akan mengadakan Rapat Koordinasi, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : **Senin, 6 Agustus 2018**
W a k t u : Pukul 15.00 WIB s.d. selesai
T e m p a t : Ruang Rapat ALPA
Gd. Nusantara III Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
Acara : 1. Konsultasi tentang isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan;
2. Lain-lain.

Mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mohon kesediaannya untuk hadir dalam rapat dimaksud.

Atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Plh. Kabag Set. Administrasi Kegiatan
Luar Negeri Anggota,

Aan Yulianingsih, S.Sos
NIP. 196512011988032001

Tembusan :

Karo Kerja Sama Antar Parlemen, sebagai laporan
Setjen dan BK DPR RI.

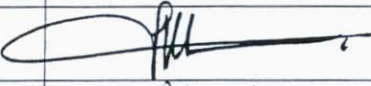

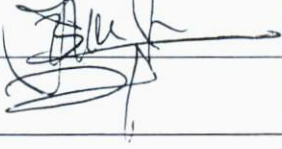




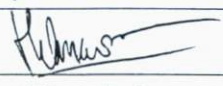





**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Tahun Sidang : 2017 - 2018
Masa Persidangan : V
Rapat Ke : --
Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Senin, 6 Agustus 2018
Waktu : Pukul 15.00 WIB. - selesai.
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III Lantai 6
Ketua Rapat : Sartomo, S.S., MSi
A c a r a : 1. Konsultasi tentang isu strategis yang berpotensi menjadi bahan
terjemahan.
2. Lain-lain.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Endah T. D Retnoastuti	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	
2.	Sartomo, S.S.M.Si	Kabag Set. Minluna	
3.	Warsiti Alfiah, S.IP., DESS	Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional	
4.	Budi Wuryanto, S.H.	Plh. Kabag Kepegawaian	
5.	Raden Anne Widyana, S.S., M.Si.	Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional	
6.	Keya Muhamad Nurcahyo, S.Sos.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional	
7.	Nofia Dewita, S.S., M.Si.	Kepala Subbagian Kesejahteraan	
8.	Rita Komariah, S.E.	Analisis Kepegawaian Muda	
9.	Aan Yulianingsih, S.Sos.	Kasubag Penyiapan Adm	
10.	Elvira Dianti A., S.S., M.Si.	Kasubag Alih Bahasa	

11.	Umiati, S.Sos.	Set. Minluna	
12.	Andriani Sofiati	Set. Minluna	
13.	Rusli Muhammad Jein	Set. Minluna	
14.	Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si	Set. Minluna	
15.	Novri Helmawan, S.Pd.	Set. Minluna	
16.	Martrisa Canda Chaniago, S.PD	Set. Minluna	
17.	Andriaji Gumilar Laksana P., S.S.	Set. Minluna	
18.	Nurul Muttaqin, S.S.	Set. Minluna	
19.	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.	Set. Minluna	
20.	Abdul Muiz, S.Pd.	Set. Minluna	



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 432/ 5715 925, WEBSITE:
www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
KEGIATAN 3
MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN SEKRETARIAT YANG MENANGANI ISU-
ISU STRATEGIS YANG BERPOTENSI MENJADI TOPIK TERJEMAHAN**

Waktu Pelaksanaan : Senin, 6 Agustus 2018
Waktu : Pukul 15.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III Lantai 6 DPR RI

Tahapan Kegiatan : 1. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang koordinasi yang akan dilakukan.
2. Mempersiapkan waktu dan tempat untuk koordinasi.
3. Melakukan koordinasi dengan sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan.
4. Membuat laporan dan analisis tentang hasil koordinasi dengan sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan.

RINGKASAN

1. Kegiatan ini diawali konsultasi dengan mentor sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi jelas dan terarah;
2. Setelah berkonsultasi dengan mentor dan Kasubag Alih Bahasa tentang koordinasi yang akan dilakukan, disetujui bahwa pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 pukul 15.00 WIB – selesai adalah waktu diadakannya pertemuan dengan sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan. Rapat tersebut bertempat di ruang rapat AIPA di Gedung Nusantara III Lantai 6 DPR RI.
3. Rapat dipimpin oleh ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si. selaku Kasubag Alih Bahasa di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna) Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro-KSAP) Setjen dan BK DPR RI. Diskusi tersebut diikuti oleh Bp. Sartomo, S.S. M.Si selaku Kabag Set. Minluna, Ibu Warsiti Alfiah, S.IP., DESS selaku Kabag Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional (Set. KSR), Bp. Budi Wuryanto, S.H selaku Plh. Kabag Kepegawaian, Ibu Raden Anne Widyana, S.S., M.Si selaku Kasubag Rapat Set. KSR, Ibu Elvira Dianti A., S.S., M.Si selaku Kasubag Alih Bahasa set. Minluna dan 7 (tujuh) Pejabat Fungsional Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, yang terdiri dari 1 (satu) Penerjemah Ahli Madya yaitu Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si., 2 (dua) Penerjemah Ahli Muda yaitu Bp. Novri Helmawan, S.Pd. dan Ibu Martrisa Canda Chaniago, S.Pd., 1 (satu) Penerjemah Ahli Pertama yaitu Bp. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S., dan 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) calon penerjemah yaitu Abdul Muiz, S.Pd, Nurul Muttaqin, S.S., dan Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
4. Diskusi lebih ter-fokus pada peningkatan kualitas penerjemahan terutama untuk CPNS calon penerjemah yang menurut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum;
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi;
 - Melakukan penerjemahan lisan para interpreting.
5. Diskusi diawali dengan pemaparan dari Ibu Warsiti Alfiah, S.IP., DESS selaku Kabag Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional (Set. KSR) mengenai tugas dan fungsi dari Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional di Biro-KSAP Setjen dan BK DPR RI. Dalam pemaparan tersebut, diketahui bahwa Set. KSR bertugas menangani forum-forum kerjasama regional. Forum-forum regional yang ditangani Set. KSR meliputi Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), Southeast Asian Parliamentary Against Corruption (SEAPAC), Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP), Asia Pacific Parliamentarians' Conference on Environment and Development (APPCED).
 6. Berkaitan dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan, Ibu Anne Widyana, selaku Kasubag Rapat Set. KSR menambahkan bahwa setiap forum regional yang ditangani oleh Set. KSR mempunyai fokus-fokus bahasan tertentu. Sebagai contoh adalah dalam sidang AIPA sering membahas topik tentang *women empowerment, youth, children, dan manpower*. Pada waktu-waktu ini bahasan tentang *narcotics* juga menjadi isu yang sering menjadi bahan diskusi.
 7. Dalam pertemuan tersebut Ibu Warsiti Alfiah, S.IP., DESS juga menyampaikan bahwa dalam AIPA, APPF, dan APA terdapat komisi khusus yang membahas tentang "Women" karena bahasan tentang wanita menjadi isu yang sensitif bagi beberapa organisasi regional.
 8. Ibu Warsiti Alfiah, S.IP., DESS dan Ibu Anne Widyana, S.S., M.Si menginformasikan bahwa setiap sidang dari masing-masing organisasi regional menghasilkan outcome yang berbeda, sebagai contoh sidang di AIPA akan menghasilkan "*resolution*", sidang di ASEP akan menghasilkan "*Declaration*", sedangkan pertemuan yang bersifat konferensi seperti Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) menghasilkan outcome yang disebut "*Chair Summary*". Perbedaan dari masing-masing outcome terletak pada daya ikat kepada masing-masing anggota organisasi-nya. Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI diharapkan mengetahui istilah-istilah tersebut karena sering menjadi bahan terjemahan.
 9. Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa penerjemah harus sering membaca berbagai referensi dan menganalisa tentang isu-isu regional yang sedang aktual, sebagai contoh saat ini di sidang di AIPA dalam pembahasan tentang narkoba sering memakai istilah "*Dangerous drugs*" karena istilah tersebut dianggap lebih berterima di dunia regional terutama di kawasan Asia tenggara.
 10. Dalam diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis besar isu-isu yang dibahas dalam pertemuan negara-negara kawasan regional dan berpotensi menjadi bahan terjemahan adalah tindak lanjut dari kesepakatan internasional tentang Sustainable Development Goals (SDGs). Penerjemah harus paham tentang SDGs tersebut.

11. Setelah diskusi dirasa cukup, pemimpin rapat menyampaikan kesimpulan koordinasi hari ini dan jika dirasa perlu akan diadakan diskusi lagi di lain kesempatan, terakhir ditutup dengan doa.

Mengetahui,
Mentor



Fusrudin Arief Budiman, SS, M.Si.
NIP. 19701105 199703 1 007

Jakarta, 6 Agustus 2018
Peserta Latsar CPNS,



Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
NIP. 19911223 201803 1 001

Foto Kegiatan 3



Foto 3.1 Koordinasi dengan Sekretariat Kerja Sama Regional yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan



Foto 3.2 Koordinasi dengan Sekretariat Kerja Sama Regional yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan

LAPORAN ANALISIS

KEGIATAN 3

MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN SEKRETARIAT YANG MENANGANI ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPOTENSI MENJADI TOPIK TERJEMAHAN

RINGKASAN MASALAH

Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian kegiatan yang disusun penulis dalam kegiatan habituasi dan aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaan sehari-hari di instansi terkait. Penulis adalah CPNS Jabatan Fungsional penerjemah di Setjen dan BK DPR RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengertian Jabatan Fungsional Penerjemah adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pengertian Penerjemah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penerjemah mempunyai tugas pokok melakukan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalih aksaraan, dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan. Ditinjau dari segi arti, pengertian penerjemahan adalah mengganti makna bahasa asal ke dalam bahasa sasaran. Dilakukan dari format bahasa pertama ke format bahasa kedua secara struktur semantik. Dimaksudkan untuk yang sudah diubah dan harus secara tetap.

Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mempunyai peran yang penting karena di tempatkan di Biro Kerjasama Antar Parlemen (Biro KSAP) yang berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) pasal 182 menjelaskan bahwa Biro KSAP mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa. Berkaitan dengan hal tersebut, CPNS penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI dikarenakan selain harus paham mengenai aturan kebahasaan dari bahasa asal ke bahasa sasaran (alih bahasa), penerjemah di lingkungan DPR RI juga harus memahami substansi dan isu-isu yang menjadi bahan terjemahan. CPNS penerjemah di Setjen DPR RI merasa kurang memahami substansi tentang isu-isu yang menjadi bahan terjemahan di lingkungan DPR RI terutama mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan kerjasama antar parlemen. Berdasarkan masalah yang muncul, penulis selaku

CPNS penerjemah di Setjen dan BK DPR RI memandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Bagian Sekretariat Kerja Sama Regional (Set. KSR) yang dikepalai oleh Ibu Warsiti Alfiah S.IP., DESS adalah mitra diskusi yang tepat bagi CPNS calon penerjemah untuk mencari informasi dan bertukar pendapat mengenai isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan mengingat Set. KSR telah sering menangani acara yang berkaitan dengan forum-forum kerja sama regional. Diskusi ini akan sangat penting bagi CPNS calon penerjemah karena akan terjadi pembagian informasi dari pegawai senior yang telah memiliki banyak pengalaman terkait kerja sama antar parlemen terutama dalam isu-isu kerja sama regional di lingkungan Setjen dan BK DPR RI sehingga dapat menambah wawasan CPNS calon penerjemah mengenai isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

ANALISIS HASIL DISKUSI

Diskusi lebih ter-fokus pada peningkatan kualitas penerjemahan terutama untuk CPNS calon penerjemah yang menurut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: (1) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik; (2) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum; (3) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi; (4) Melakukan penerjemahan lisan para interpreting.

Rapat dipimpin oleh ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si. selaku Kasubag Alih Bahasa di Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna) Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro-KSAP) Setjen dan BK DPR RI. Diskusi tersebut diikuti oleh Bp. Sartomo, S.S. M.Si selaku Kabag Set. Minluna, Ibu Warsiti Alfiah, S.IP., DESS selaku Kabag Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional (Set. KSR), Bp. Budi Wuryanto, S.H selaku Plh. Kabag Kepegawaian, Ibu Raden Anne Widyana, S.S., M.Si selaku Kasubag Rapat Set. KSR, Ibu Elvira Dianti A., S.S., M.Si selaku Kasubag Alih Bahasa set. Minluna dan 7 (tujuh) Pejabat Fungsional Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, yang terdiri dari 1 (satu) Penerjemah Ahli Madya yaitu Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si., 2 (dua) Penerjemah Ahli Muda yaitu Bp. Novri Helmawan, S.Pd. dan Ibu Martrisa Canda Chaniago, S.Pd., 1 (satu) Penerjemah Ahli Pertama yaitu Bp. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S., dan 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) calon penerjemah yaitu Abdul Muiz, S.Pd, Nurul Muttaqin, S.S., dan Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.

Diskusi diawali dengan pemaparan dari Ibu Warsiti Alfiah, S.IP., DESS selaku Kabag Set. KSR mengenai tugas dan fungsi dari bagian ini. Dalam pemaparan tersebut, diketahui bahwa Set. KSR bertugas menangani forum-forum kerja sama regional. Forum-forum regional yang ditangani Set. KSR meliputi Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), Southeast Asian Parliamentary Against Corruption (SEAPAC), Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP), Asia Pacific Parliamentarians' Conference on Environment and Development (APPCED).

Pembahasan lebih mengerucut tentang AIPA karena organisasi tersebut sering melibatkan penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam pertemuan-pertemuan anggotanya mengingat kantor sekretariat AIPA berada di dalam lingkungan DPR RI lebih tepatnya berada di gedung Nusantara 3 lantai 6 DPR RI. Berkaitan dengan hal tersebut penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI harus memahami terlebih dahulu tentang AIPA karena isu-isu dalam organisasi tersebut adalah isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Penulis selaku CPNS calon penerjemah telah merangkum tentang pengertian dan sejarah berdirinya AIPA.

ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dulunya bernama ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO). Proses kelahirannya berawal dari keinginan para anggota Parlemen Negara-negara anggota ASEAN yang berupaya menumbuhkan kesepahaman bersama dalam membantu dan mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat termasuk untuk menjembatani pemecahan permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN.

Inisiatif pembentukannya merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an didorong oleh kemajuan yang dibuat oleh ASEAN. DPR-RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang terdiri dari parlemen-parlemen dari negara anggota ASEAN yang saat itu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Ide tersebut mendapat sambutan yang positif dari Parlemen Malaysia dan Singapura saat berkunjung ke Indonesia tahun 1973. Pada tahun 1974, DPR-RI mengirim utusan khusus ke Parlemen Thailand dan Filipina untuk mencari dukungan pembentukan forum parlemen ASEAN tersebut dan mendapat sambutan positif.

AIPO resmi dibentuk sebagai organisasi resmi antar-parlemen negara-negara Anggota ASEAN melalui penandatanganan Statuta AIPO oleh para Ketua Delegasi pada tanggal 2 September 1977. Sidang Umum ke-1 AIPO diselenggarakan pada tanggal 26 – 28 September 1978 di Singapura. Sidang Umum AIPO diselenggarakan sekali setahun di negara-negara Anggota AIPO secara bergiliran sesuai urutan alfabetis negara-negara Anggota AIPO.

Pada Sidang Umum ke-27 AIPO tahun 2006 di Cebu City, Filipina, Statuta AIPO resmi diamandemen menjadi Statuta AIPA. Hal ini merupakan kesepakatan negara-negara anggota untuk mentransformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan terintegrasi dengan nama AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) sebagaimana tercantum dalam pembukaan dan Pasal I Statuta AIPA.

Saat ini, AIPA beranggotakan 10 Parlemen dari Negara-negara anggota ASEAN (Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam dan Myanmar).

Perubahan Signifikan Transformasi AIPO Menjadi AIPA

Sesuai dengan Statuta AIPA yang merupakan hasil amandemen dari Statuta AIPO, terdapat beberapa perubahan yang signifikan antara lain:

- a. Struktur atau alat kelengkapan AIPA terdiri dari Sidang Umum, Presidency, Komisi Executive, Komisi-komisi dan Sekretariat;
- b. Sidang Umum dapat membuat inisiatif kebijakan dan memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan dan dapat mengusulkan inisiatif legislatif tentang masalah-masalah yang menjadi concern bersama untuk direkomendasikan kepada pemerintah masing-masing anggota untuk menjadi pertimbangan
- c. Untuk tercapainya tujuan ASEAN dan Vision 2020 sebagaimana tercantum dalam Bali Concord II, AIPA akan mengadakan reciprocal meeting dengan ASEAN secara reguler. Dalam hal ini, Presiden AIPA atau yang mewakilinya diberi mandat untuk menghadiri ASEAN Summits dan sebaliknya, ASEAN Standing Committee atau yang mewakilinya dapat menghadiri Sidang Umum AIPA.
- d. Presiden AIPA diberi mandat untuk mengambil inisiatif untuk mengadakan sidang Executive Committee berdasarkan rekomendasi dari Anggota Parlemen negara-negara Anggota AIPA untuk mendiskusikan hal-hal yang mendesak.
- e. Sekretaris Jenderal AIPA dipilih oleh Sidang Umum untuk masa jabatan selama 3 tahun secara digilir berdasarkan alfabetis. Sekretaris Jenderal berdomisili di Jakarta sesuai dengan lokasi Kantor Sekretariat Permanen AIPA

Maksud dan Tujuan AIPA

1. memajukan solidaritas, saling pengertian, kerjasama dan hubungan yang erat antar negara anggota, negara peninjau khusus, negara peninjau dan organisasi parlemen lainnya;
2. memfasilitasi pencapaian tujuan ASEAN sebagaimana tercantum dalam ASEAN Declaration Agustus 1967 serta ASEAN Vision 2020 seperti yang dinyatakan dalam Bali Concord II 2003 untuk mencapai realisasi sebuah ASEAN Community yang berdasar pada tiga pilar : ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC);
3. meningkatkan kerjasama dan kesepahaman antara AIPA dengan organisasi parlemen lainnya baik di tingkat regional maupun internasional;
4. melakukan pertukaran dan penyebaran informasi serta koordinasi, interaksi, dan konsultasi dengan ASEAN dalam rangka memberikan kontribusi parlemen terhadap integrasi ASEAN dan memperkenalkan kebijakan yang bertujuan mengakselerasi realisasi ASEAN Community kepada rakyat Asia Tenggara;
5. memajukan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, keamanan dan kesejahteraan di wilayah ASEAN.

Alat Kelengkapan AIPA

Dalam rangka membantu untuk lebih mengefektifkan tugas-tugasnya, AIPO membentuk alat kelengkapan. Sesuai dengan Amandemen Statuta AIPO, alat kelengkapan AIPA terdiri dari :

a. Sidang Umum

Sidang Umum merupakan alat kelengkapan dan badan tertinggi AIPA yang diselenggarakan sekali dalam setahun sesuai dengan pasal 10 Statuta AIPA. Sidang Umum menetapkan arah kebijakan organisasi guna mencapai tujuan-tujuan AIPA dan merupakan forum untuk saling bertukar pengalaman dan ide bagi para anggota AIPA. Sesuai Article 12, agenda sidang yang akan dibahas dalam Sidang Umum ditetapkan oleh Executive Committee.

Peserta Sidang Umum adalah parlemen-parlemen Anggota AIPA (maksimal 15 orang setiap Delegasi) dan Observer. Sidang Umum dipimpin oleh Presiden AIPA yang menjabat sebagai Ketua Parlemen negara tuan rumah penyelenggara Sidang Umum dan para Ketua Delegasi bertindak sebagai Wakil Presiden Sidang Umum. Masa jabatan Presiden AIPA adalah satu tahun, dimulai dari berakhirnya satu Sidang Umum sampai akhir Sidang Umum berikutnya. Hasil akhir Sidang Umum adalah resolusi atau rekomendasi yang dirangkum dalam suatu Joint Communiqué yang ditandatangani oleh para Ketua Delegasi.

b. Executive Committee

Executive Committee merupakan badan eksekutif di bawah Sidang Umum. Keanggotaan Executive Committee dari masing-masing parlemen negara Anggota AIPA tidak lebih dari 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah Ketua Parlemen. Presiden AIPA adalah Ketua Executive Committee. Atas permintaan anggota parlemen, Executive Committee dapat mengadakan sidang untuk membahas masalah-masalah urgen yang menjadi masalah bersama. Hasil sidang Executive Committee disampaikan ke Sidang Umum untuk disahkan.

c. Standing Committee, Study Committee dan Ad Hoc Committee

Dengan persetujuan Sidang Umum, agenda yang diusulkan oleh Executive Committee kemudian akan dibahas secara lebih mendalam dalam Komisi-komisi yang terdiri dari :

- Committee on Political Matters;
- Committee on Economic Matters;
- Committee on Social Matters;
- Committee on Organizational Matters;
- Committee on Joint Communiqué; dan
- Committee on Dialogue with Observer Countries

Komisi Organisasi bertugas membahas yang berkaitan dengan masalah organisasi (internal affairs). Keempat Komisi dimaksud merumuskan dan membahas resolusi, yang kemudian disahkan dalam Pleno Sidang Umum. Selain itu, dalam sidang-sidangnya, Sidang Umum juga membentuk Committee on Joint Communiqué yang merumuskan dan membahas Joint Communiqué. Di samping itu, juga bersidang Committee on Dialogue with Observer Countries, yaitu dialog antara negara anggota AIPA dengan negara-negara peninjau (observer).

Sesuai pasal 18 Statuta AIPA, Sidang Umum dapat pula membentuk Study Committee atau Ad Hoc Committee untuk membahas lebih lanjut isu-isu yang menjadi perhatian bersama negara-negara anggota AIPA. Dalam dekade terakhir, isu-isu yang telah dibahas dalam Study Committee dan Ad Hoc Committee antara lain :

- Common Legislation on Narcotics, Drug Abuse and Rehabilitation
- Feasibility of Establishing ASEAN Legislative Committee
- Human Rights
- Environment and Wildlife Protection
- Marine and Coastal Resources
- Enhancement of the AIPA Permanent Secretariat
- Enhancement of the AIPA Permanent Secretariat
- ASEAN Laws Related to or Having an impact on the Implementation of AFTA (ASEAN Free Trade Area)
- Role of ASEAN Legislative Bodies in the Face of the Regional Economic and Financial Crisis
- ASEAN Cooperation on Public Health

d. Komisi Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

Komisi Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) dibentuk pada tahun 1998 dan bersidang sehari sebelum Sidang Umum resmi dibuka. Sesuai dengan Statuta AIPA, maka WAIPA berubah menjadi WAIPA. Komisi ini diketuai oleh salah satu Anggota Parlemen Perempuan dari negara tuan rumah penyelenggara.

Maksud dan Tujuan WAIPA antara lain:

- meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam AIPA;
- meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen kawasan ASEAN;
- mengupayakan agar isu-isu tentang perempuan menjadi agenda Sidang Umum;
- mengadakan pertemuan tahunan disela-sela Sidang Umum
- memfasilitasi networking antar Anggota Parlemen Perempuan di ASEAN;
- membentuk networking dengan asosiasi-asosiasi perempuan lainnya dan pertemuan pertemuan tentang perempuan yang diselenggarakan oleh organisasi regional maupun internasional.

Komisi ini dalam sidang-sidangnya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan yang dituangkan dalam resolusi.

e. Sekretariat Tetap

Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Statuta AIPA, Sekretariat Tetap AIPA didirikan pada tahun 1990 yang berkedudukan di Jakarta. Sekretariat Tetap berfungsi sebagai pusat informasi dan kantor administratif AIPA yang menangani, memfasilitasi dan memantau kegiatan-kegiatan AIPA. Untuk kegiatan operasional Sekretariat AIPA, pendanaannya berasal dari kontribusi para negara-negara anggota AIPA. Sejak tahun 2016, kontribusi negara anggota AIPA naik dari US \$ 30.000 menjadi US\$ 35.000 per tahun.

Dalam Statuta AIPA dinyatakan bahwa Sekretariat AIPA dipimpin oleh Sekretaris Jenderal AIPA yang diangkat oleh Sidang Umum dengan masa jabatan 3 tahun secara bergiliran menurut tata urutan alfabetis negara anggota AIPA. Sekretaris Jenderal AIPA yang pertama adalah Hon. Dato' Mohamed Yusoff bin Mohamed Zain dari Malaysia yang mulai aktif bekerja di Sekretariat AIPA, 1 Mei 2007 dan berdomisili di Jakarta sesuai kesepakatan Sidang Luar Biasa Executive Committee pada April 2007 di Kuala Lumpur.

Untuk periode 2016-2019, Sekretaris Jenderal AIPA dijabat oleh Mr. Isra Sunthornvut dari Thailand.

Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa penerjemah harus sering membaca berbagai referensi dan menganalisa tentang isu-isu regional yang sedang aktual, sebagai contoh saat ini dalam pembahasan tentang narkoba di sidang AIPA sering memakai istilah "Dangerous drugs" karena istilah tersebut dianggap lebih berterima di dunia regional terutama di kawasan Asia tenggara. Secara garis besar isu-isu yang dibahas dalam pertemuan regional dan berpotensi menjadi bahan terjemahan adalah tindak lanjut dari kesepakatan tentang Sustainable Development Goals (SDGs). Penerjemah harus paham tentang SDGs tersebut.

Berdasarkan bahasan dalam diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan dalam pertemuan regional adalah tentang kesepakatan kerjasama dan penanggulangan masalah yang menjadi perhatian bersama antar negara-negara terkait terutama yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Maka penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI diharapkan mengetahui tentang substansi masalah2 tersebut sehingga hasil terjemahan menjadi lebih baik dan berterima.

REKOMENDASI

Beberapa catatan yang dapat diambil dari rapat koordinasi dengan Bagian Set. KSR adalah terdapat beberapa masalah yang dihadapi CPNS penerjemah Setjen dan BK DPR RI dalam melakukan tugas penerjemahan antara lain adalah CPNS penerjemah kurang memahami substansi tentang isu-isu yang menjadi bahan terjemahan dan kurang memahami tentang istilah-istilah yang harus dipakai dalam tugas penerjemahan dalam forum-forum regional. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penerjemahan di Setjen dan BK DPR RI. Rekomendasi tersebut adalah diadakannya *(1.) Pelatihan penerjemahan di lingkup Setjen dan BK DPR RI yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan dan (2) pembuatan daftar istilah yang sering dipakai dalam tugas penerjemahan di forum-forum regional dan internasional.*

Jakarta, 6 Agustus 2018
Peserta Latsar CPNS,

Mengetahui,
Mentor



Fusrudin Arief Budiman, SS, M.Si.
NIP. 19701105 199703 1 007



Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
NIP. 19911223 201803 1 001

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Kegiatan 3: Melakukan koordinasi dengan sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Sudah melaksanakan bidang atau aktifitas sesuai dgn Perencanaan	fb
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Menyelesaikan tahap 3 dari rencana kegiatan yang telah disusun	fb
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sangat terkait antara Substansi dengan mata pelatihan	fb
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	untuk pengetahuan yang lebih mendalam & kedarifan penerjemahan	fb
Penguatan Nilai Organisasi	Meningkatkan Profesionalisme	fb

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

- 3) Kegiatan 3: Melakukan koordinasi dengan sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Koordinasi dgn sekretariat internal bagian back, lanjutkan	Dis kusi 27/07/18
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Analisa hasil diskusi sedar zaman	none
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	KM EP akuntabilitas dan WOB	none
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Kualitas terjemahan mendukung Tusi organisasi	none
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel, Profesional, Dominan pt lapangan ini	none

LAMPIRAN

KEGIATAN 4



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

3 September 2018

Nomor : DP/14887/SETJEN DAN BK-DPRRI/AP.04/09/2018
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth.

Kepala Bagian Set. Kerja Sama Bilateral
Biro Kerja Sama Antar Parlemen Setjen dan BK DPR RI
Jakarta

Dengan hormat kami beritahukan, bahwa dalam rangka Habitiasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana kegiatan habitiasi tersebut Melakukan koordinasi dengan pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan, sehubungan dengan itu kami mengundang Kepala Kepala Bagian Set. Kerja Sama Bilateral pada:

Hari, tanggal : Rabu, 5 September 2018
Waktu : Pukul 14.00 - Selesai
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III DPR RI Lt. 6
Acara : Melakukan koordinasi dengan pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan

Atas perhatian dan kehadiran saudara kami mengucapkan terimakasih

Kabag Set. Administrasi
Kegiatan Luar Negeri Anggota

Sartomo, S.S., M.Si
NIP. 196808111996031001






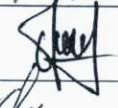

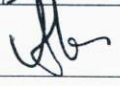


SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Tahun Sidang : 2018 - 2019
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --
Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Rabu, 5 September 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB. - selesai.
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III Lantai 6
Ketua Rapat : Sartomo, S.S., MSi
A c a r a : 1. Melakukan Koordinasi dengan Pejabat yang telah sering ikut dalam menyelenggarakan konferensi yang membahas isu isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.
2. Lain-lain.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sartomo, S.S.M.Si	Kabag Set. Minluna	
2.	Drs. Robert Juheng Purba	Kabag Set Kerjasama Bilateral	
3.	Aan Yulianingsih, S.Sos.	Kasubag Penyiapan Adm	
4.	Elvira Dianti A., S.S., M.Si.	Kasubag Alih Bahasa	
5.	Umiati, S.Sos.	Set. Minluna	
6.	Andriani Sofiati	Set. Minluna	
7.	Rusli Muhammad Jein	Set. Minluna	
8.	Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si	Set. Minluna	
9.	Novri Helmawan, S.Pd.	Set. Minluna	
10.	Martrisa Canda Chaniago, S.PD	Set. Minluna	
11.	Andriaji Gumilar Laksana P., S.S.	Set. Minluna	
12.	Nurul Muttaqin, S.S.	Set. Minluna	
13.	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.	Set. Minluna	
14.	Abdul Muiz, S.Pd.	Set. Minluna	



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 432/ 5715 925, WEBSITE:
www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
KEGIATAN 4
MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT YANG TELAH SERING IKUT
DALAM PENYELENGGARAAN KONFERENSI YANG MEMBAHAS ISU-ISU
STRATEGIS YANG BERPOTENSI MENJADI BAHAN TERJEMAHAN.**

- Waktu Pelaksanaan : Rabu, 5 September 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III Lantai 6 DPR RI
- Tahapan Kegiatan : 1. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang koordinasi yang akan dilakukan.
2. Mempersiapkan waktu dan tempat koordinasi dengan pejabat terkait.
3. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.
4. Membuat laporan dan analisis tentang hasil koordinasi dengan pejabat terkait.

RINGKASAN

1. Kegiatan ini diawali konsultasi dengan mentor sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi jelas dan terarah;
2. Setelah berkonsultasi dengan mentor dan Kasubag Alih Bahasa tentang koordinasi yang akan dilakukan, disetujui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 pukul 14.00 WIB – selesai adalah waktu diadakannya pertemuan dengan pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Rapat tersebut bertempat di ruang rapat AIPA di Gedung Nusantara III Lantai 6 DPR RI.
3. Rapat dipimpin oleh Bp. Sartomo, S.S. M.Si selaku Kepala Bagian Sekretariat Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna) Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro-KSAP) Setjen dan BK DPR RI. Diskusi tersebut diikuti oleh Ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si. selaku Kasubag Alih Bahasa, 7 (tujuh) Pejabat Fungsional Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, yang terdiri dari 1 (satu) Penerjemah Ahli Madya yaitu Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si., 2 (dua) Penerjemah Ahli Muda yaitu Bp. Novri Helmawan, S.Pd. dan Ibu Martrisa Canda Chaniago, S.Pd., 1 (satu) Penerjemah Ahli Pertama yaitu Bp. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S., dan 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) calon penerjemah yaitu Abdul Muiz, S.Pd, Nurul Muttaqin, S.S., Yudi Chandri Setiawan, S.Pd, dan mengundang Bapak Drs. Robert Juheng Purba selaku Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral dan sebagai pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi regional dan internasional.

4. Diskusi lebih ter-fokus pada peningkatan kualitas penerjemahan terutama untuk CPNS calon penerjemah yang menurut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum;
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi;
 - Melakukan penerjemahan lisan para interpreting.
5. Diskusi diawali dengan pemaparan dari Bapak Drs. Robert Juheng Purba selaku Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral dan sebagai pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi regional dan internasional. Karena termasuk pegawai senior, beliau menceritakan pengalaman kerja nya selama bekerja di Setjen dan BK DPR RI khususnya di Biro-KSAP. Dalam pemaparan yang disampaikan, diketahui bahwa bapak Drs. Robert Juheng Purba pernah menjabat sebagai Kasubag Alih Bahasa yang membawahi para penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional. Beliau telah sering mengikuti konferensi Internasional khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja sama antar parlemen.
6. Berkaitan dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan, Bapak Drs. Robert Juheng Purba menyampaikan bahwa setiap konferensi mempunyai fokus-fokus bahasan tertentu. Sebagai contoh adalah dalam sidang AIPA yang dulunya bernama AIPO sering membahas topik tentang *women empowerment, youth, children, dan manpower*. Pada waktu-waktu ini bahasan tentang *narcotics* juga menjadi isu yang sering menjadi bahan diskusi.
7. Dalam diskusi tersebut bapak Drs. Robert Juheng Purba juga menyampaikan bahwa kebanyakan bahasan dalam konferensi Internasional terutama yang berkaitan dengan kerja sama antar parlemen adalah bahasan yang terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan tentang perdagangan manusia. Karena itu beliau menyarankan kepada para penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI untuk banyak membaca dan mencari data dari bahasan – bahasan tersebut supaya hasil terjemahan menjadi lebih baik dan berterima. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam sidang Inter Parliamentary Union (IPU) selalu menghasilkan outcome yang disebut resolusi, bahasan dalam sidang di IPU biasanya membahas tentang kemerdekaan Palestina dan *Human Trafficking*.
8. Berkaitan dengan Bagian Kerja Sama Bilateral yang beliau tangani, Bapak Drs. Robert Juheng Purba menyampaikan bahwa pembahasan di kerja sama bilateral lebih umum dan tergantung kepentingan negara masing-masing. Dalam kunjungan bilateral biasanya ada 5 (lima) tujuan kunjungan bilateral yaitu Pimpinan Parlemen, Komisi/Komite Luar Negeri, Grup Kerja sama Bilateral (GKSB), Kementerian Luar Negeri, dan Industri Strategis dari negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut penerjemah harus banyak membaca dan mencari referensi dari substansi yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.
9. Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa dalam kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dengan pimpinan parlemen yang dikunjungi biasanya juga membahas tentang isu kerja sama politik, ekonomi, perdagangan dan pertahanan.
10. Dalam diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis besar isu-isu yang dibahas dalam konferensi Internasional seperti sidang di IPU adalah tindak lanjut dari kesepakatan internasional tentang Sustainable Development Goals (SDGs). Selain hal tersebut, penerjemah diharapkan mampu mencari referensi terkait dengan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat.

11. Setelah diskusi dirasa cukup, ketua rapat menyampaikan kesimpulan koordinasi hari ini dan jika dirasa perlu akan diadakan diskusi lagi di lain kesempatan, pertemuan ditutup dengan doa.

Mengetahui,
Mentor



Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si.
NIP. 19701105 199703 1 007

Jakarta, 5 September 2018
Peserta Latsar CPNS,



Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
NIP. 19911223 201803 1 001

Foto Kegiatan 4



Foto 4.1 Koordinasi dengan Bp. Drs. Robert juheng Purba selaku pejabat yang sering mengikuti konferensi internasional yang membahas isu strategis yang menjadi bahan terjemahan



Foto 4.2 Koordinasi dengan Bp. Drs. Robert juheng Purba selaku pejabat yang sering mengikuti konferensi internasional yang membahas isu strategis yang menjadi bahan terjemahan

LAPORAN ANALISIS

KEGIATAN 4

MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT YANG TELAH SERING IKUT DALAM PENYELENGGARAAN KONFERENSI YANG MEMBAHAS ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPOTENSI MENJADI BAHAN TERJEMAHAN.

Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian kegiatan yang disusun penulis dalam kegiatan habituasi dan aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaan sehari-hari di instansi terkait. Penulis adalah CPNS Jabatan Fungsional penerjemah di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Setjen dan BK DPR RI). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengertian Jabatan Fungsional Penerjemah adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pengertian Penerjemah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penerjemah mempunyai tugas pokok melakukan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalih aksaraan, dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan. Ditinjau dari segi arti, pengertian penerjemahan adalah mengganti makna bahasa asal ke dalam bahasa sasaran. Dilakukan dari format bahasa pertama ke format bahasa kedua secara struktur semantik. Dimaksudkan untuk yang sudah diubah dan harus secara tetap.

Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mempunyai peran yang penting karena di tempatkan di Biro Kerjasama Antar Parlemen (Biro KSAP) yang berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Setjen dan BK DPR RI pasal 182 menjelaskan bahwa Biro KSAP mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa. Berkaitan dengan hal tersebut, CPNS penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI dikarenakan selain harus paham mengenai aturan kebahasaan dari bahasa asal ke bahasa sasaran (alih bahasa), penerjemah di lingkungan DPR RI juga harus memahami substansi dan isu-isu yang menjadi bahan terjemahan. CPNS penerjemah di Setjen DPR RI merasa kurang memahami substansi tentang isu-isu yang menjadi bahan terjemahan di lingkungan DPR RI terutama mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan kerjasama antar parlemen. Berdasarkan masalah yang muncul, penulis selaku CPNS penerjemah di Setjen dan BK DPR RI memandang perlu untuk diadakannya koordinasi dengan pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Bp. Drs. Robert Juheng Purba adalah mitra diskusi yang tepat bagi CPNS calon penerjemah dan para penerjemah senior di lingkungan Setjen dan BK DPR RI karena beliau termasuk pegawai senior di Biro KSAP Setjen dan BK DPR RI. Selama bekerja di instansi tersebut, beliau pernah memangku berbagai jabatan strategis seperti menjadi Kepala Sub Bagian Alih Bahasa yang membawahi para penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional serta sering mengikuti konferensi Internasional khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja sama antar parlemen. Diskusi ini akan sangat penting bagi CPNS calon penerjemah karena akan terjadi pembagian informasi dari pejabat senior yang telah memiliki banyak pengalaman terkait kerja sama antar parlemen terutama tentang isu-isu dan istilah yang sering dipakai dalam konferensi internasional yang berkaitan dengan kerja sama antar parlemen sehingga dapat menambah wawasan CPNS calon penerjemah dan diharapkan kualitas terjemahan menjadi lebih baik dan lebih berterima.

ANALISIS HASIL DISKUSI

Diskusi lebih ter-fokus pada peningkatan kualitas penerjemahan terutama untuk CPNS calon penerjemah yang menurut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: (1) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik; (2) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum; (3) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi; (4) Melakukan penerjemahan lisan para interpreting.

Rapat dipimpin oleh Bp. Sartomo, S.S. M.Si selaku Kepala Bagian Sekretariat Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna) Biro-KSAP Setjen dan BK DPR RI. Diskusi tersebut diikuti oleh ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si. selaku Kasubag Alih Bahasa, 7 (tujuh) Pejabat Fungsional Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, yang terdiri dari 1 (satu) Penerjemah Ahli Madya yaitu Bp. Fusrudin Arief Budiman, SS, M.Si., 2 (dua) Penerjemah Ahli Muda yaitu Bp. Novri Helmawan, S.Pd. dan Ibu Martrisa Canda Chaniago, S.Pd., 1 (satu) Penerjemah Ahli Pertama yaitu Bp. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S., dan 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) calon penerjemah yaitu Abdul Muiz, S.Pd, Nurul Muttaqin, S.S., Yudi Chandri Setiawan, S.Pd, dan mengundang Bapak Drs. Robert Juheng Purba selaku Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral dan sebagai pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi regional dan internasional.

Diskusi diawali dengan pemaparan dari Bapak Drs. Robert Juheng Purba selaku Kepala Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral dan sebagai pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi regional dan internasional. Karena termasuk pegawai senior, beliau menceritakan pengalaman kerja nya selama bekerja di Setjen dan BK DPR RI khususnya di Biro-KSAP. Dalam pemaparan yang disampaikan, diketahui bahwa bapak Drs. Robert Juheng Purba pernah menjabat sebagai Kasubag Alih Bahasa yang membawahi para penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional. Beliau telah sering mengikuti konferensi Internasional dan regional khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja sama antar parlemen.

Berkaitan dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan, Bapak Drs. Robert Juheng Purba menyampaikan bahwa setiap konferensi mempunyai fokus-fokus bahasan tertentu. Sebagai contoh adalah dalam sidang AIPA yang dulunya bernama AIPO sering membahas topik tentang *women empowerment, youth, children, dan manpower*. Pada waktu-waktu ini bahasan tentang *narcotics* juga menjadi isu yang sering menjadi bahan diskusi.

Dalam diskusi tersebut bapak Drs. Robert Juheng Purba juga menyampaikan bahwa kebanyakan bahasan dalam konferensi Internasional terutama yang berkaitan dengan kerja sama antar parlemen adalah bahasan yang terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan tentang perdagangan manusia. Karena itu beliau menyarankan kepada para penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI untuk banyak membaca dan mencari data dari bahasan – bahasan tersebut supaya hasil terjemahan menjadi lebih baik dan berterima. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam sidang Inter Parliamentary Union (IPU) selalu menghasilkan outcome yang disebut resolusi, bahasan dalam sidang di IPU biasanya membahas tentang kemerdekaan Palestina dan *Human Trafficking*.

Berkaitan dengan Bagian Kerja Sama Bilateral yang beliau tangani, Bapak Drs. Robert Juheng Purba menyampaikan bahwa pembahasan di kerja sama bilateral lebih umum dan tergantung kepentingan negara masing-masing. Dalam kunjungan bilateral biasanya ada 5 (lima) tujuan kunjungan bilateral yaitu Pimpinan Parlemen, Komisi/Komite Luar Negeri, Grup Kerja sama Bilateral (GKSB), Kementerian Luar Negeri, dan Industri Strategis dari negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut penerjemah harus banyak membaca dan mencari referensi dari substansi yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa dalam kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dengan pimpinan parlemen yang dikunjungi biasanya juga membahas tentang isu kerja sama politik, ekonomi, perdagangan dan pertahanan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara garis besar isu-isu yang dibahas dalam konferensi Internasional seperti sidang di IPU adalah tindak lanjut dari kesepakatan internasional tentang Sustainable Development Goals (SDGs). Selain hal tersebut, penerjemah diharapkan mampu mencari referensi terkait dengan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat.

Berkaitan dengan hal tersebut penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI harus memahami terlebih dahulu tentang Sustainable Development Goals (SDGs) karena isu tersebut adalah isu paling strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Sebelum menindak lanjuti tentang SDGs penerjemah harus memahami terlebih dahulu tentang Millenium Development Goals (MDGs), maka penulis selaku CPNS calon penerjemah telah merangkum tentang pengertian MDGs dan SDGs.

Pengertian dan Tujuan MDGs

Pengertian Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "Tujuan Pembangunan Milenium", adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dihasilkan dari kesepakatan antar kepala negara beserta perwakilan dari 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di kota New York, Amerika Serikat pada bulan September

tahun 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam rangka menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi, kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Deklarasi ini adalah kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan MDGs, yaitu sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan serta kelaparan. (*Eradicate extreme poverty and hunger.*)
2. Mencapai Pendidikan dasar untuk semua kalangan. (*Achieve universal primary education.*)
3. Mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. (*Promote gender equality and empower women.*)
4. Menurunkan angka kematian pada Anak. (*Reduce child mortality.*)
5. Meningkatkan kesehatan Ibu. (*Improve maternal health.*)
6. Memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria serta penyakit menular lainnya. (*Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases.*)
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. (*Ensure environmental sustainability.*)
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan. (*Develop a global partnership for development.*)

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya adalah Indonesia, dimana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada hakikatnya semua tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan. Dalam MDGs potret dari kemakmuran rakyat diukur melalui berbagai indikator seperti bertambah tingginya tingkat pendapatan penduduk dari waktu ke waktu, kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang membaik, bertambah banyaknya penduduk yang menempati rumah layak huni, lingkungan permukiman yang nyaman bebas dari gangguan alam dan aman, penduduk mempunyai kesempatan untuk mengakses sumber daya yang tersedia, lapangan kerja yang terbuka untuk semua penduduk, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

Penerapan MDGs di Indonesia

Setelah kita membahas pengertian dan tujuan MDGs (Millennium Development Goals), Lalu bagaimana penerapan MDGs di Indonesia ? Dalam laporan Bappenas tahun 2010, pemerintah Indonesia mengklaim 8 dari target MDGs hampir semuanya tercapai. Selanjutnya Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kala itu (18/7/2017), dalam keterangan tertulisnya

mengatakan "Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan". Berikut beberapa kutipan dari laporan Bappenas mengenai tujuan MDGS

1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem

Pada tujuan MDGs yang pertama, pemerintah Indonesia menerapkan tiga target, yaitu:

- a. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015.
- b. Menyediakan seutuhnya Pekerjaan yang produktif dan layak, terutama untuk perempuan dan kaum muda.
- c. Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara 1990-2015.

2. Mewujudkan Pendidikan Dasar untuk Semua

Target Indonesia dalam tujuan ke dua dari MDGs ini ialah memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak di manapun ia berada baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya secara utuh.

3. Mendorong Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target berikutnya dari tujuan MDGs yang pemerintah Indonesia jalankan adalah menghapus ketimpangan gender pada tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, lebih baik pada 2005, dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tercapai pada tahun 2015.

4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Selanjutnya pada tujuan menurunkan angka kematian anak, Indonesia mematok target dapat menekan angka kematian balita sebesar 2/3 nya antara tahun 1990-2015.

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target awal dalam peningkatan kesehatan ibu ialah menurunkan angka kematian ibu yang ditargetkan sebesar tiga perempatnya antara 1990-2015. Dan berikutnya adalah untuk mencapai serta menyediakan akses untuk kesehatan reproduksi untuk semua masyarakat pada tahun 2015.

6. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria Serta Penyakit Lainnya

Pemerintah Indonesia menerapkan tiga target untuk mencapai tujuan ini yaitu tersedianya akses universal yang ditujukan untuk perawatan terhadap HIV&AIDS bagi yang membutuhkan pada tahun 2010, menghentikan dan mulai membalikkan trend penyebaran HIV&AIDS pada tahun 2015, menghentikan serta mulai membalikkan kecenderungan persebaran malaria serta penyakit-penyakit utama lainnya pada tahun 2015.

7. Memastikan Kelestarian Lingkungan

Ada 4 target yang ingin dicapai pemerintah dalam mewujudkan tujuan ini, yaitu: menggabungkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan serta program negara dan mengakhiri kerusakan sumberdaya alam. mengurangi dan menghentikan laju hilangnya keragaman hayati, serta mencapai pengurangan yang signifikan pada tahun 2010. Memangkas setengah dari jumlah penduduk yang tidak memiliki jaringan air minum yang sehat pada tahun 2015. dan pada tahun 2020 diharapkan dapat mencapai perbaikan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal pada daerah kumuh..

8. Mengembangkan Kemitran Global untuk Pembangunan

Tujuan MDGs terakhir ini, berkaitan dengan kerjasama internasional, yaitu menelaah isu-isu seperti perdagangan, utang internasional dan bantuan. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar target dan indikator yang ada ditujukan untuk negara-negara maju agar turut membantu negara-negara miskin didunia dalam mencapai tujuan-tujuan MDGs lainnya.

9. Meng-Indonesiakan MDGs

Tujuan ini adalah tujuan yang ditambahkan sendiri oleh pemerintah Indonesia agar MDGs lebih dikenal di tingkat daerah, kabupaten dan kota sehingga terjadi integrasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan MDGs secara bersama-sama.

Perbedaan MDGs dengan SDGs

Pada dasarnya MDGs dan SDGs memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama. hal tersebut karena SDGs melanjutkan tujuan utama dari MDGs yaitu perihal penanggulangan kelaparan dan kemiskinan di dunia. Namun, dokumen MDGs yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 tersebut telah habis pada tahun 2015. Kemudian para pemimpin dunia merasa agenda MDGs perlu diteruskan, sehingga muncul sebuah dokumen usulan bernama SDGs

Setelah kita mengetahui bahwa SDGs adalah kelanjutan dari MDGs dan mengetahui persamaannya, selanjutnya selain persamaan tentunya juga terdapat beberapa perbedaan antara MDGs dengan SDGs. Salah satu perbedaannya adalah MDGs hanya mempunyai 8 tujuan sedangkan SDGs memiliki 17 Tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target, oleh sebab itu SDGs mempunyai cakupan yang lebih luas dan akan mampu lebih tanggap atas penyebab utama kemiskinan serta kebutuhan universal. Tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum dan keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs meliputi lebih banyak aspek kehidupan yang diiringi dengan ambisi untuk menanggapi perubahan iklim, pekerjaan yang layak, ketidaksetaraan, pertumbuhan ekonomi, kota dan pemukiman masyarakat, industrialisasi, energi, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, perdamaian dan keadilan.

Tujuan serta target SDGs akan dimonitor dan ditinjau setiap saat dengan menggunakan indikator-indikator global. Kerangka kerja indikator global tersebut juga terus dikembangkan oleh Kelompok Lintas Badan dan Ahli. Selain itu pemerintah juga akan turut serta mengembangkan indikator-indikator nasional guna membantu memantau kemajuan dalam mencapai tujuan dan target SDGs. Berikutnya tindak lanjut dalam proses peninjauan akan dilaksanakan setiap tahun oleh Forum Tingkat Tinggi Politik tentang Pembangunan Berkelanjutan dengan menggunakan sebuah Laporan Kemajuan SDGs yang dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal.

REKOMENDASI

Beberapa catatan yang dapat diambil dari koordinasi dengan pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan, yaitu terdapat beberapa masalah yang dihadapi CPNS penerjemah Setjen dan BK DPR RI dalam melakukan tugas penerjemahan antara lain adalah CPNS penerjemah kurang memahami substansi tentang isu-isu yang menjadi bahan terjemahan dan kurang memahami tentang istilah-istilah yang harus dipakai dalam tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penerjemahan di Setjen dan BK DPR RI. Rekomendasi tersebut adalah diadakannya *(1.) Pelatihan penerjemahan di lingkup Setjen dan BK DPR RI yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan* dan *(2) pembuatan daftar istilah yang sering dipakai dalam tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI.*

Mengetahui,
Mentor



Fusrudin Arief Budiman, SS, M.Si.
NIP. 19701105 199703 1 007

Jakarta, 5 September 2018
Peserta Latsar CPNS,








Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
NIP. 19911223 201803 1 001

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Kegiatan 4: Melakukan koordinasi dengan pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Sudah melaksanakan aktifitas sesuai perencanaan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Menyelesaikan tahap 4 dan menghasilkan info terkait bilateral dan regional	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sangat terkait karena masih terdapat permasalahan yg perlu dipecahkan	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	✓ Pengetahuan Substansi & kelancaran proses penerjemahan.	
Penguatan Nilai Organisasi	Meningkatkan profesionalisme	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

- 4) Kegiatan 4: Melakukan koordinasi dengan pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Tahapan koordinasi berjalan baik dapat dilanjutkan	diskusi 24/08/18 widi
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Analisa hasil diskusi	widi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	K.M. EP, Wob akuntabilitas	widi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mengukur Visi & Misi organisasi	widi
Penguatan Nilai Organisasi	Aktualisasi, Profesional menjadi acuan	widi

LAMPIRAN KEGIATAN 5



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : DP/16408/Setjen DPR RI/AP.04/09-2018

24 September 2018

Sifat : Penting

Derajat: Segera

Perihal : **Undangan**

Yth.

1. Kabid Perencanaan Diklat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen dan BK DPR RI

2. Para Pejabat Fungsional Penerjemah

Biro Kerja Sama Antar Parlemen Setjen dan BK DPR RI

Jakarta

Dengan hormat kami beritahukan, bahwa dalam rangka Habitiasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka kami akan mengadakan rapat koordinasi internal penerjemah dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal	: Rabu, 26 September 2018
Waktu	: Pukul 10.00 - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat AIPA Gd. Nusantara III DPR RI Lt. 4
Acara	: Melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil diskusi kepada penerjemah dan stakeholder terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara kami mengucapkan terima kasih

Kabag Set. Administrasi Kegiatan
Luar Negeri Anggota

Sartomo, S.S., M.Si

NIP. 196808111996031001



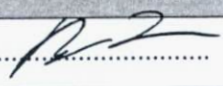
**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR HADIR

Tahun Sidang : 2018 - 2019
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --
Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Rabu, 26 September 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB. - selesai. •
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III Lantai 6
Ketua Rapat : Sartomo, S.S., MSi
A c a r a : 1. Melakukan Sosialisasi dan diseminasi hasil diskusi kepada pemerjemah dan stakholder terkait isu -isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.
2. Lain-lain.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	1.
2.	Sartomo, S.S.M.Si	Kabag Set. Minluna	2.
3.	Elvira Dianti A., S.S., M.Si.	Kasubag Alih Bahasa	3.
4.	Umiati, S.Sos.	Set. Minluna	4.
5.	Andriani Sofiati	Set. Minluna	5.
6.	Rusli Muhammad Jein	Set. Minluna	6.
7.	Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si	Set. Minluna	7.
8.	Novri Helmawan, S.Pd.	Set. Minluna	8.
9.	Martrisa Canda Chaniago, S.PD	Set. Minluna	9.
10.	Andriaji Gumilar Laksana P., S.S.	Set. Minluna	10.
11.	Nurul Muttaqin, S.S.	Set. Minluna	11.
12.	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.	Set. Minluna	12.
13.	Abdul Muiz, S.Pd.	Set. Minluna	13.

PENDUKUNG

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Baginda JRAS	Penyusun bahan kebijakan Pusdiklat	1. 
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 432/ 5715 925, WEBSITE:
www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
KEGIATAN 5
MELAKUKAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL ANALISIS KEPADA
PENERJEMAH DAN STAKEHOLDER TERKAIT ISU-ISU STRATEGIS YANG
BERPOTENSI MENJADI BAHAN TERJEMAHAN**

Waktu Pelaksanaan : Rabu, 26 September 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat AIPA
Gd. Nusantara III Lantai 6 DPR RI

Tahapan Kegiatan : 1. Merapikan format hasil analisis isu.
2. Mencetak hasil analisis isu.
3. Memaparkan dan membagikan hasil analisis isu kepada penerjemah dan stakeholder.

RINGKASAN

1. Kegiatan ini diawali konsultasi dengan mentor sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi jelas dan terarah;
2. Setelah berkonsultasi dengan mentor dan Kasubag Alih Bahasa tentang koordinasi yang akan dilakukan, disetujui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 10.00 WIB – selesai adalah waktu diadakannya pertemuan dengan pejabat yang telah sering ikut dalam penyelenggaraan konferensi yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Rapat tersebut bertempat di ruang rapat AIPA di Gedung Nusantara III Lantai 6 DPR RI.
3. Rapat dipimpin oleh Bp. Sartomo, S.S. M.Si selaku Kepala Bagian Sekretariat Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (Minluna) Biro Kerja Sama Antar Parlemen Setjen dan BK DPR RI. Diskusi tersebut diikuti oleh Ibu Elvira Dianti A., SS, M.Si. selaku Kasubag Alih Bahasa, 7 (tujuh) Pejabat Fungsional Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, yang terdiri dari 1 (satu) Penerjemah Ahli Madya yaitu Bp. Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si., 2 (dua) Penerjemah Ahli Muda yaitu Bp. Novri Helmawan, S.Pd. dan Ibu Martrisa Canda Chaniago, S.Pd., 1 (satu) Penerjemah Ahli Pertama yaitu Bp. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S., dan 3 (tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) calon penerjemah yaitu Abdul Muiz, S.Pd, Nurul Muttaqin, S.S., Yudi Chandri Setiawan, S.Pd, dan mengundang Kepala Bidang Perencanaan Diklat DPR RI yang diwakili oleh Bapak Baginda Jaya Rakhmat Aidhil Subur, S.I.A. selaku Penyusun Bahan Kebijakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPR RI.
4. Diskusi lebih ter-fokus pada peningkatan kualitas penerjemahan terutama untuk CPNS calon penerjemah yang menurut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik
 - Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum;

- Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi;
 - Melakukan penerjemahan lisan para interpreting.
5. Rapat dibuka oleh Bp. Sartomo, S.S. M.Si selaku kabag Minluna dan dilanjutkan oleh pemaparan tentang analisa isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan oleh Yudi Chandri Setiawan, S.Pd selaku penulis. Dalam pemaparan tersebut terdapat 2 (dua) isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan yaitu isu tentang Sustainable Development Goals (SDGs) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Penulis berpendapat bahwa kedua isu tersebut adalah isu yang paling strategis dan berpotensi menjadi bahan terjemahan karena di dalam rapat-rapat koordinasi yang telah dilaksanakan isu-isu tersebut adalah isu yang sering disebut.
 6. Selain memaparkan hasil analisa mengenai isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan, Yudi Chandri Setiawan S.Pd juga mengharapkan adanya pelatihan penerjemahan untuk CPNS calon penerjemah yang difasilitasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPR RI sehingga hasil terjemahan para penerjemah di DPR RI menjadi lebih baik dan berterima.
 7. Setelah pemaparan selesai, terdapat beberapa masukan dari Bp. Sartomo, S.S. M.Si tentang isu-isu yang disampaikan. Menurut beliau penulis seharusnya membatasi isu yang akan dianalisa. Beliau menyarankan bahwa seharusnya isu yang diangkat terfokus pada SDGs dengan pengertian dan analisa yang lebih mendalam karena kebanyakan bahasan dalam konferensi Internasional dan regional terutama yang berkaitan dengan kerja sama antar parlemen adalah bahasan yang terkait dengan turunan dari SDGs yang berjumlah 17 (tujuh belas) point. Karena itu beliau menyarankan kepada para penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI untuk banyak membaca dan mencari data dari bahasan – bahasan tersebut supaya hasil terjemahan menjadi lebih baik dan berterima.
 8. Setelah mendengar masukan dari Bp. Sartomo, S.S. M.Si, Bp. Andriaji Gumilar Laksanaputra, S.S. selaku penerjemah senior juga mengungkapkan hal yang senada. Beliau mengungkapkan bahwa isu tentang SDGs adalah bahasan yang kompleks sehingga bisa lebih diperdalam lagi dan seharusnya isu tersebut juga dikaitkan dengan penerjemahan di lingkungan DPR RI sehingga penerjemah lain yang membaca analisa tersebut dapat memahami substansi dan istilah-istilah mengenai bahasan tersebut.
 9. Setelah diskusi dirasa cukup, ketua rapat menyampaikan kesimpulan rapat hari ini dan meminta penulis untuk memperbaiki hasil analisa mengenai isu-isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Jika dirasa perlu akan diadakan diskusi lagi di lain kesempatan, pertemuan ditutup dengan doa.

Mengetahui,
Mentor



Fasrudin Arief Budiman, SS, M.Si.
NIP. 19701105 199703 1 007

Jakarta, 26 September 2018
Peserta Latsar CPNS,



Yudi Chandri Setiawan, S.Pd.
NIP. 19911223 201803 1 001

Foto Kegiatan 5

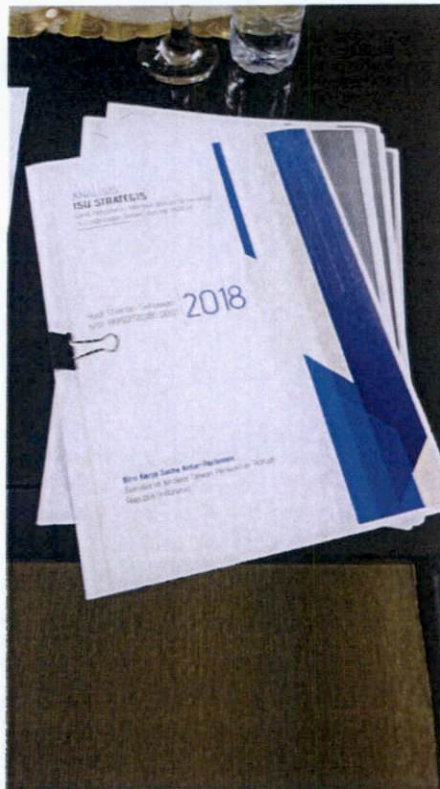


Foto 5.1 Laporan hasil analisa isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.



Foto 5.1 Sosialisasi dan diseminasi hasil analisa kepada penerjemah dan stakeholder terkait isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

ANALISIS ISU STRATEGIS

yang Berpotensi Menjadi Bahan Terjemahan
di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI

Yudi Chandri Setiawan
NIP: 199112232018031001

2018

Biro Kerja Sama Antar-Parlemen

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

RINGKASAN MASALAH

PENINGKATAN KOMPETENSI PENERJEMAH TENTANG ISU STRATEGIS YANG BERPOTENSI MENJADI BAHAN TERJEMAHAN

Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian kegiatan yang disusun penulis dalam kegiatan habituasi dan aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pekerjaan sehari-hari di instansi terkait. Penulis adalah CPNS Jabatan Fungsional penerjemah di Setjen dan BK DPR RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengertian Jabatan Fungsional Penerjemah adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pengertian Penerjemah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penerjemah mempunyai tugas pokok melakukan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalih aksaraan, dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan. Ditinjau dari segi arti, pengertian penerjemahan adalah mengganti makna bahasa asal ke dalam bahasa sasaran. Dilakukan dari format bahasa pertama ke format bahasa kedua secara struktur semantik. Dimaksudkan untuk yang sudah diubah dan harus secara tetap.

Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mempunyai peran yang penting karena ditempatkan di Biro Kerjasama Antar Parlemen (Biro KSAP) yang berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) pasal 182 menjelaskan bahwa Biro KSAP mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa. Berkaitan dengan hal tersebut, CPNS penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI dikarenakan selain harus paham mengenai aturan kebahasaan dari bahasa asal ke bahasa sasaran (alih bahasa), penerjemah di lingkungan DPR RI juga harus memahami substansi dan isu-isu yang menjadi bahan terjemahan terutama mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan kerjasama antar parlemen. Selain hal tersebut CPNS penerjemah juga kurang memahami tentang istilah-istilah yang sering dipakai dalam penerjemahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Dampak jika masalah ini tidak dibenahi adalah kurang maksimalnya hasil terjemahan penerjemah di Setjen dan BK DPR RI dan mempengaruhi hasil kinerja dari Anggota DPR RI dalam melakukan kerja sama antar parlemen. Berdasarkan masalah yang muncul, penulis selaku CPNS penerjemah di Setjen dan BK DPR RI memandang perlu untuk melakukan

serangkaian kegiatan dan koordinasi dengan sekretariat dan pejabat terkait untuk meningkatkan kemampuan penerjemah mengenai isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan sehingga hasil terjemahan para penerjemah di Setjen dan BK DPR RI menjadi lebih baik dan berterima.

PENINGKATAN KOMPETENSI PENERJEMAH TENTANG ISU STRATEGIS YANG BERPOTENSI MENJADI BAHAN TERJEMAHAN

Yudi Chandri Setiawan *)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pengertian Jabatan Fungsional Penerjemah adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pengertian Penerjemah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penerjemah mempunyai tugas pokok melakukan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalih aksaraan, dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan. Ditinjau dari segi arti, pengertian penerjemahan adalah mengganti makna bahasa asal ke dalam bahasa sasaran. Dilakukan dari format bahasa pertama ke format bahasa kedua secara struktur semantik. Dimaksudkan untuk yang sudah diubah dan harus secara tetap.

Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mempunyai peran yang penting karena di tempatkan di Biro Kerjasama Antar Parlemen (Biro KSAP) yang berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) pasal 182 menjelaskan bahwa Biro KSAP mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa. \

Kurangnya Kompetensi CPNS calon penerjemah dan Faktor Penyebabnya

Penulis adalah CPNS Calon Penerjemah Ahli Pertama di Setjen dan BK DPR RI merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI dikarenakan isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan di lingkungan DPR RI sangat beragam dan kompleks mengingat DPR RI adalah lembaga politik yang terdiri dari berbagai komisi dengan permasalahannya masing-masing. Penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI selain harus paham mengenai aturan kebahasaan dari bahasa asal ke bahasa sasaran (alih bahasa), juga harus memahami substansi dan isu-isu yang menjadi bahan terjemahan terutama mengenai isu-isu strategis yang berkaitan dengan kerjasama antar parlemen. Selain hal tersebut CPNS penerjemah juga kurang memahami tentang istilah-istilah yang sering dipakai dalam penerjemahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Berdasarkan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa CPNS Calon penerjemah mengalami kesulitan dalam penerjemahan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu : 1) kurang memahami substansi tentang isu strategis yang menjadi bahan terjemahan terutama mengenai kerja sama antar parlemen. 2) kurang memahami tentang istilah-istilah yang sering dipakai dalam penerjemahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Pendalaman tentang Isu Strategis yang Menjadi Bahan Terjemahan

Berdasarkan masalah yang muncul, penulis selaku CPNS penerjemah di Setjen dan BK DPR RI memandang perlu untuk melakukan serangkaian kegiatan dan koordinasi dengan sekretariat dan pejabat terkait untuk meningkatkan kemampuan penerjemah mengenai isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan sehingga hasil terjemahan para penerjemah di Setjen dan BK DPR RI menjadi lebih baik dan berterima. Rangkaian kegiatan tersebut antara lain: 1) Mencari referensi terkait isu-isu strategis yang menjadi bahan terjemahan melalui media cetak ataupun elektronik; 2) Melakukan FGD (Focus Group Discussion) internal penerjemah Setjen DPR RI terkait dengan isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan. 3) Melakukan koordinasi dengan sekretariat yang menangani isu-isu strategis yang berpotensi menjadi topik terjemahan. 4) Melakukan diseminasi hasil diskusi kepada penerjemah dan stakeholder terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. 5) Melakukan diseminasi hasil diskusi kepada penerjemah dan stakeholder terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Rangkaian kegiatan tersebut ter-fokus untuk meningkatkan kualitas penerjemahan terutama untuk CPNS calon penerjemah yang menurut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: (1) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah bahan informasi publik; (2) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah hukum; (3) Melakukan penerjemahan, penyuntingan, dan penyeliaan naskah biografi; (4) Melakukan penerjemahan lisan parainterpreting.

Dari pencarian referensi dan berbagai diskusi yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan di lingkungan DPR RI sangat beragam dan kompleks mengingat DPR RI adalah lembaga politik yang terdiri dari berbagai komisi dengan permasalahannya masing-masing. Untuk mengatasi masalah tersebut maka penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI harus memahami struktur organisasi dan tugas-tugas dari instansi DPR RI dan instansi pendukungnya yaitu Setjen dan BK DPR RI. Secara garis besar isu yang berpotensi menjadi bahan terjemahan mengenai kerja sama antar parlemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan tujuan program Millenium Sustainable Goals (MDGs) yang saat ini telah menjadi Sustainable Development Goals (SDGs).

Berkaitan dengan hal tersebut penerjemah di lingkungan Setjen dan BK DPR RI harus memahami terlebih dahulu tentang SDGs karena isu tersebut adalah isu paling strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan. Sebelum menindak lanjuti tentang SDGs penerjemah harus memahami terlebih dahulu tentang Millennium Development Goals (MDGs), maka penulis selaku CPNS calon penerjemah telah merangkum tentang pengertian MDGs dan SDGs.

Pengertian dan Tujuan MDGs

Pengertian Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "Tujuan Pembangunan Milenium", adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dihasilkan dari kesepakatan antar kepala negara beserta perwakilan dari 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di kota New York, Amerika Serikat pada bulan September tahun 2000. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam rangka menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi, kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Deklarasi ini adalah kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan MDGs, yaitu sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan serta kelaparan. (*Eradicate extreme poverty and hunger.*)
2. Mencapai Pendidikan dasar untuk semua kalangan. (*Achieve universal primary education.*)
3. Mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. (*Promote gender equality and empower women.*)
4. Menurunkan angka kematian pada Anak. (*Reduce child mortality.*)
5. Meningkatkan kesehatan Ibu. (*Improve maternal health.*)
6. Memerangi penyakit HIV/AIDs, malaria serta penyakit menular lainnya. (*Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases.*)
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. (*Ensure environmental sustainability.*)
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan. (*Develop a global partnership for development.*)

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah satunya adalah Indonesia, dimana kegiatan MDGs di Indonesia mencakup pelaksanaan kegiatan monitoring MDGs. Sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs.

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada hakikatnya semua tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan. Dalam MDGs potret dari kemakmuran rakyat diukur melalui berbagai indikator seperti bertambah tingginya tingkat pendapatan penduduk dari waktu ke waktu, kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang membaik, bertambah banyaknya penduduk yang menempati rumah layak huni, lingkungan permukiman yang nyaman bebas dari gangguan alam dan aman, Penduduk mempunyai kesempatan untuk mengakses sumber daya yang tersedia, lapangan kerja yang terbuka untuk semua penduduk, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan.

Penerapan MDGs di Indonesia

Setelah kita membahas pengertian dan tujuan MDGs (Millennium Development Goals), Lalu bagaimana penerapan MDGs di Indonesia ? Dalam laporan Bappenas tahun 2010, pemerintah Indonesia mengklaim 8 dari target MDGs hampir semuanya tercapai. Selanjutnya Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kala itu (18/7/2017), dalam keterangan tertulisnya mengatakan "Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan". Berikut beberapa kutipan dari laporan Bappenas mengenai tujuan MDGS

1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem

Pada tujuan MDGs yang pertama, pemerintah Indonesia menerapkan tiga target, yaitu:

- a. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015.
- b. Menyediakan seutuhnya Pekerjaan yang produktif dan layak, terutama untuk perempuan dan kaum muda.
- c. Menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara 1990-2015.

2. Mewujudkan Pendidikan Dasar untuk Semua

Target Indonesia dalam tujuan ke dua dari MDGs ini ialah memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak di manapun ia berada baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya secara utuh.

3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target berikutnya dari tujuan MDGs yang pemerintah Indonesia jalankan adalah menghapus ketimpangan gender pada tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, lebih baik pada 2005, dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tercapai pada tahun 2015.

4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Selanjutnya pada tujuan menurunkan angka kematian anak, Indonesia mematok target dapat menekan angka kematian balita sebesar 2/3 nya antara tahun 1990-2015.

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target awal dalam peningkatan kesehatan ibu ialah menurunkan angka kematian ibu yang ditargetkan sebesar tiga perempatnya antara 1990-2015. Dan berikutnya adalah untuk mencapai serta menyediakan akses untuk kesehatan reproduksi untuk semua masyarakat pada tahun 2015.

6. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria Serta Penyakit Lainnya

Pemerintah Indonesia menerapkan tiga target untuk mencapai tujuan ini yaitu tersedianya akses universal yang ditujukan untuk perawatan terhadap HIV&AIDS bagi yang membutuhkan pada tahun 2010, menghentikan dan mulai membalikkan trend penyebaran HIV&AIDS pada tahun 2015, menghentikan serta mulai membalikkan kecenderungan persebaran malaria serta penyakit-penyakit utama lainnya pada tahun 2015.

7. Memastikan Kelestarian Lingkungan

Ada 4 target yang ingin dicapai pemerintah dalam mewujudkan tujuan ini, yaitu: menggabungkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan serta program negara dan mengakhiri kerusakan sumberdaya alam. mengurangi dan menghentikan laju

hilangnya keragaman hayati, serta mencapai pengurangan yang signifikan pada tahun 2010. Memangkas setengah dari jumlah penduduk yang tidak memiliki jaringan air minum yang sehat pada tahun 2015. dan pada tahun 2020 diharapkan dapat mencapai perbaikan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal pada daerah kumuh..

8. Mengembangkan Kemitran Global untuk Pembangunan

Tujuan MDGs (Millennium Development Goals) terakhir ini, berkaitan dengan kerjasama internasional, yaitu menelaah isu-isu seperti perdagangan, utang internasional dan bantuan. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar target dan indikator yang ada ditujukan untuk negara-negara maju agar turut membantu negara-negara miskin di dunia dalam mencapai tujuan-tujuan MDGs lainnya.

9. Meng-Indonesiakan MDGs

Tujuan ini adalah tujuan yang ditambahkan sendiri oleh pemerintah Indonesia agar MDGs lebih dikenal di tingkat daerah, kabupaten dan kota sehingga terjadi integrasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan MDGs secara bersama-sama.

Perbedaan MDGs dengan SDGs

Pada dasarnya MDGs dan SDGs memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama. hal tersebut karena SDGs melanjutkan tujuan utama dari MDGs yaitu perihal penanggulangan kelaparan dan kemiskinan di dunia. Namun, dokumen MDGs yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 tersebut telah habis pada tahun 2015. Kemudian para pemimpin dunia merasa agenda MDGs (Millennium Development Goals) perlu diteruskan, sehingga muncul sebuah dokumen usulan bernama SDGs (Sustainable Development Goals).

Setelah kita mengetahui bahwa SDGs adalah kelanjutan dari MDGs dan mengetahui persamaannya, selanjutnya selain persamaan tentunya juga terdapat beberapa perbedaan antara MDGs dengan SDGs. Salah satu perbedaannya adalah MDGs hanya mempunyai 8 tujuan sedangkan SDGs memiliki 17 Tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target, oleh sebab itu SDGs mempunyai cakupan yang lebih luas dan akan mampu lebih tanggap atas penyebab utama kemiskinan serta kebutuhan universal. Tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum dan keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs meliputi lebih banyak aspek kehidupan yang diiringi dengan ambisi untuk menanggapi perubahan iklim, pekerjaan yang layak, ketidaksetaraan, pertumbuhan ekonomi, kota dan pemukiman masyarakat, industrialisasi, energi, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, perdamaian dan keadilan.

Tujuan serta target SDGs akan dimonitor dan ditinjau setiap saat dengan menggunakan indikator-indikator global. Dan kerangka kerja indikator global tersebut juga terus dikembangkan oleh Kelompok Lintas Badan dan Ahli. Selain itu pemerintah juga akan turut serta mengembangkan indikator-indikator nasional guna membantu memantau kemajuan dalam mencapai tujuan dan target SDGs. Berikutnya tindak lanjut dalam proses peninjauan akan dilaksanakan setiap tahun oleh Forum Tingkat Tinggi Politik tentang Pembangunan Berkelanjutan dengan menggunakan sebuah Laporan Kemajuan SDGs yang dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Bulan September 2015 meluncurkan SDGs atau Sustainable Development Goals yang merupakan agenda global yang melanjutkan upaya dan capaian agenda global sebelumnya yaitu MDGs yang sudah banyak merubah wajah dunia 15 tahun kearah yang lebih baik.

SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind".

Jika sebelumnya MDGs memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, antara lain; 1) Menangulangi kemiskinan dan kelaparan, 2) Mencapai pendidikan dasar secara universal, 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) Menurunkan angka kematian anak, 5) Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya, 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup, 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. SDs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia, antara lain;

1. Tanpa Kemiskinan (No poverty)

Tujuan ke-1 memiliki 7 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, masih ada 22,76 penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional dengan tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu NTT, Papua dan Papua Barat.

2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)

Tujuan ke-2 memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan lembar Fakta SDGs Indonesia. pada periode 2007-2013, prevalensi kekurangan gizi (underweight) meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-Being)

Tujuan ke-3 memiliki 13 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin baik yaitu pada periode 1991-2015 Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 390 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dan pada periode yang sama, Angka Kematian Bayi (AKB) juga mengalami penurunan dari 68 per 1000 kelahiran hidup menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup.

4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education)

Tujuan ke-4 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia. Pada tahun 2016, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI/ sederajat sebesar 109,31%, untuk tingkat SMP/MTs/ sederajat sebesar 90,12% dan untuk

SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 80,89% dengan 97,7% penduduk Indonesia berusia 15-24 tahun sudah melek huruf.

5. Kesetaraan Gender (Gender Equality)

Tujuan ke-5 memiliki 9 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, bahwa presentase kekerasan terhadap masih cukup tinggi sekitar 41,7% perempuan umur 15-64 tahun mengalami sedikitnya 1 dari 4 jenis kekerasan (fisik, seksual, emosional, ekonomi) selama hidupnya, dimana kasus kekerasan lebih tinggi di daerah perkotaan sebesar 36,3% dibandingkan daerah perdesaan sebesar 29,5%.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation)

Tujuan ke-6 memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, sekitar 70,97% rumah tangga di Indonesia pada tahun 2015 telah memiliki akses air minum yang layak namun baru ada sekitar 62,14% rumah tangga di Indonesia yang memiliki sanitasi layak.

7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy)

Tujuan ke-7 memiliki 5 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia. Pada tahun 2016, rasio elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai 91,16% artinya masih ada 8,84% masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan akses listrik, dan masalah pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia, seperti energi dari tenaga angin, air dan panas bumi baru sebesar 7%, padahal Indonesia memiliki energi panas bumi yang sangat potensial untuk dikembangkan.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)

Tujuan ke-8 memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia. Pada tahun 2016, dari 43 juta penduduk usia muda (15-24 tahun), sebanyak 25% tidak dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional sebesar 5,61% dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kaum Muda sebesar 19,54%.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (industry, Innovation, and Infrastructure)

Tujuan ke-9 memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia laju pertumbuhan industri manufaktur mencapai 4,29% pada tahun 2016, dan sektor ini mampu menyerap 13,24% tenaga kerja serta menyumbangkan 21,39% PDB Indonesia. dan tidak hanya itu, tahun 2014, 93,95% jalan nasional masuk dalam kondisi mantap.

10. Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities)

Tujuan ke-10 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, koefisien GINI Indonesia menurun dari 0,41 pada 2015 menjadi 0,39

pada tahun 2016. Namun, masih ada 122 daerah/kabupaten ditetapkan sebagai daerah tertinggal 2015-2019 oleh pemerintah.

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (sustainable Cities and Communities)

Tujuan ke-11 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia. Pada tahun 2015, sekitar 87,92% rumah tangga di Indonesia telah menempati rumah layak huni dan pada periode 2014-2015 baru sebanyak 61% atau 357 kota/kabupaten telah memenuhi kriteria sebagai kota berskala baik.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)

Tujuan ke-12 memiliki 11 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia. Pada tahun 2016, hampir 100% limbah B3 dari 1.640 perusahaan (121.655.524,23 ton) telah dikelola. Namun, penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di bank sampah hanya mengurangi 0,014% timbulan sampah.

13. Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)

Tujuan ke-13 memiliki 5 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia. Data dan informasi bencana tahun 2016, sebanyak 2.139.124 orang menderita akibat bencana. Oleh karena itu untuk mengurangi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim 33 dari 34 provinsi telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

14. Ekosistem Lautan (Life Below Water)

Tujuan ke-14 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia. Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang terluas di dunia yang mencapai 2.5 juta ha dan sekitar 6.20% dalam kondisi sangat bagus.

15. Ekosistem Daratan (Vie Terrestre)

Tujuan ke-15 memiliki 12 Target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk melindungi, merotasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosisten daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, terjadi peningkatan kasus peredaran ilegal TSL (Tanaman dan Satwa Liar yang sudah ditangani sampai P.21 sebanyak 43 kasus (2015) menjadi 51 kasus (2016).

16. Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh (Peace, justice and Strong Institutions)

Tujuan ke-16 memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua tingkatan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, dalam segi pelaporan keuangan. Pada tahun 2015 laporan keuangan 71%

kementerian/lembaga, 85% provinsi, 54% kabupaten dan 65% kota di Indonesia mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan ditahun yang sama untuk Indeks Perilaku Anti Korupsi dari skala 0 samapai 5, Indonesia berada pada nilai 3,59%.

17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (Partnership for The Goals)

Tujuan ke-17 memiliki 19 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia. Remitansi yang diterima Indonesia meningkat dari 6.736 juta USD pada tahun 2011 menjadi 8.860 juta USD pada tahun 2016 dan pada periode yang sama, kontribusi Remitansi tenaga kerja Indonesia meningkat dari 0,75% menjadi 0,95%.

Oleh karena itu. untuk mensukseskan pencapaian 17 tujuan SDGs yang dicanangkan oleh negara-negara di dunia. Indonesia menunjukkan komitmen tinggi yaitu dengan telah ditandatangani Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017 oleh Presiden Joko Widodo, dan dibentuk tim koordinasi SDGs Nasional dibawah koordinasi Kepala Bappenas.

Berkaitan dengan penerjemahan di DPR RI, beberapa isu tentang SDGs sering diangkat menjadi bahan diskusi dalam forum regional dan internasional khususnya yang berkaitan dengan kerja sama antar parlemen. Sebagai contoh di bulan September 2018 Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan acara Internasional yang dihadiri oleh berbagai parlemen dari Negara lain. Acara tersebut bernama “2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development” yang diselenggarakan di Bali. Nama acara tersebut sudah menggambarkan bahwa hal yang dibahas dalam forum tersebut berkaitan dengan SDGs terutama mengenai Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action), Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy), Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production), dan Kesetaraan Gender (Gender Equality). Karena acara tersebut adalah acara internasional dan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar, maka penerjemah di DPR RI mempunyai peran yang penting demi kelancaran acara tersebut, maka penerjemah di DPR RI diharapkan mampu memahami tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan sehingga hasil terjemahan menjadi lebih baik dan berterima,

Istilah – Istilah Penerjemahan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI

Selain harus memahami tentang isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan seperti MDGS dan SDGs, penerjemah di DPR RI juga diharapkan mampu memahami istilah-istilah yang sering dipakai dalam penerjemahan terutama yang berkaitan dengan kerja sama antar parlemen. Berkaitan dengan hal tersebut penulis selaku CPNS calon penerjemah telah membuat daftar beberapa istilah penting yang sering dipakai dalam penerjemahan di DPR RI. Daftar istilah tersebut antara lain:

Istilah Indonesia	English Term
ALAT KELENGKAPAN DEWAN	COMPLEMENTARY ORGANS OF THE HOUSE / PARLIAMENTARY ORGAN OF THE HOUSE
BALEG (BADAN LEGISLASI)	LEGISLATION COMMITTEE
BAMUS (BADAN MUSYAWARAH)	STEERING COMMITTEE

BK (BADAN KEHORMATAN)	ETHICS COMMITTEE
MKD (MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN)	ETHICS COUNCIL
BURT (BADAN URUSAN RUMAH TANGGA)	HOUSEHOLD COMMITTEE
BKSAP (BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN)	THE COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION
BAKN (BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA)	PUBLIC ACCOUNT COMMITTEE
BIRO HUMAS DAN PEMBERITAAN	BUREAU OF PUBLIC RELATIONS AND PUBLICATION
BADAN KEAHLIAN DEWAN (BKD)	PARLIAMENTARY EXPERTISE AGENCY
DPD (DEWAN PERWAKILAN DAERAH)	REGIONAL REPRESENTATIVES COUNCIL
DPRD (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)	REGIONAL LEGISLATIVE ASSEMBLY
DPR RI	THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ATAU THE INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES
DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)	CENTRAL BOARD
DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)	REGIONAL BOARD
DEPUTI SEKJEN DPR	DEPUTY SECRETARY GENERAL (THERE ARE 4 DEPUTIES)
GKSB (GRUP KERJASAMA BILATERAL)	BILATERAL COOPERATION GROUP / PARLIAMENTARY FRIENDSHIP GROUP
HUMAS	PUBLIC RELATIONS
KETUA DPR	SPEAKER
WAKIL KETUA DPR	VICE/DEPUTY SPEAKER
KETUA KOMISI/BADAN	CHAIRMAN/CHAIRPERSON
WAKIL KETUA BADAN/KOMISI	VICE/DEPUTY CHAIRMAN/CHAIRPERSON
KUHAP	CRIMINAL LAW PROCEDURE CODE
KOMISI	COMMISSION
MPR (MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT)	PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY
MASA SIDANG	SESSION PERIOD/SITTING PERIOD
MASA RESES	RECESS PERIOD
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)	ETHICS COUNCIL
MINLUNA (ADMINISTRASI LUAR NEGERI ANGGOTA)	MP'S ADMINISTRATION OF FOREIGN VISIT
PANSUS (PANITIA KHUSUS)	SPECIAL COMMITTEE /AD HOC COMMITTEE
PANJA (PANITIA KERJA)	WORKING COMMITTEE
BAGIAN PEMBERITAAN	INFORMATION AND PUBLICATION DEPARTMENT
PENGAWASAN	OVERSIGHT
P3DI (Pusat pengkajian dan pengolahan data dan informasi)	CENTRE FOR RESEARCH, DATA AND INFORMATION PROCESSING (P3DI) OR POPULARLY KNOWN AS CENTER FOR RESEARCH AND INFORMATION
PENERJEMAH AHLI PERTAMA	ASSISTANT TRANSLATOR
PENERJEMAH AHLI MUDA	JUNIOR TRANSLATOR
PENERJEMAH AHLI MADYA	SENIOR TRANSLATOR
PENERJEMAH AHLI UTAMA	PRINCIPAL TRANSLATOR
SEKRETARIS JENDERAL	SECRETARY GENERAL
TATIB DPR RI	RULES OF PROCEDURES OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
T.A. (TENAGA AHLI)	EXPERT STAFF
TENAGA PERANCANG UNDANG-UNDANG (TENAGA	LEGAL DRAFTER

PUU)	
Tahun Sidang	SESSION YEAR / SITTING YEAR
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (FPD)	DEMOCRAT PARTY FACTTION
FRAKSI PARTAI GOLKAR (FPG)	GOLKAR PARTY FACTION
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN. (FPDI-P)	INDONESIAN DEMOCRATIC PARTY OF STRUGGLE FACTION
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)	PROSPEROUS JUSTICE PARTY FACTION
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (FPAN)	NATIONAL MANDATE PARTY FACTION
FRAKSI PARTAI PERSARTUAN PEMBANGUNAN (FPPP)	UNITED DEVELOPMENT PARTY FACTION
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)	NATIONAL AWAKENING PARTY FACTION
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (FP. GERINDRA)	GREAT INDONESIA MOVEMENT PARTY FACTION
FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (FP. HANURA)	PEOPLE'S CONSCIENCE PARTY FACTION
TANPA KEMISKINAN	NO POVERTY
TANPA KELAPARAN	ZERO HUNGER
KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	GOOD HEALTH AND WELL-BEING
PENDIDIKAN BERKUALITAS	QUALITY EDUCATION
AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	CLEAN WATER AND SANITATION
KESETARAAN GENDER	GENDER EQUALITY
ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE
BERKURANGNYA KESENJANGAN	REDUCED INEQUALITIES
KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	CLIMATE ACTION
EKOSISTEM LAUTAN	LIFE BELOW WATER
EKOSISTEM DARATAN	VIE TERRESTRE
PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	PARTNERSHIP FOR THE GOALS

Rekomendasi: Peningkatan Kompetensi Penerjemah Tentang Isu Strategis Yang Berpotensi Menjadi Bahan Terjemahan






Beberapa catatan yang dapat diambil dari rangkaian kegiatan aktualisasi seperti pencarian referensi dan koordinasi dengan sekretariat dan pejabat terkait mengenai peningkatan kompetensi penerjemah tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan adalah terdapat beberapa masalah yang dihadapi CPNS penerjemah Setjen dan BK DPR RI dalam melakukan tugas penerjemahan antara lain adalah CPNS penerjemah kurang memahami substansi tentang isu-isu yang menjadi bahan terjemahan dan kurang memahami tentang istilah-istilah yang harus dipakai dalam tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penerjemahan di Setjen dan BK DPR RI.

Rekomendasi tersebut adalah diadakannya *(1.)Pelatihan penerjemahan di lingkup Setjen dan BK DPR RI yang membahas isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan* dan *(2) pembuatan daftar istilah yang sering dipakai dalam tugas penerjemahan di lingkungan DPR RI.*

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Kegiatan 5: Melakukan diseminasi hasil diskusi kepada penerjemah dan stakeholder terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Kelanjutan dari tahap 4	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Menyelesaikan tahap 5 & menghasilkan 'informasi' seluruh permasalahan yg menjadi permasalahan penerjemah	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sangat terkait karena ada permasalahan yang substansi yg harus dipelajari	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Y' pengetahuan Substansi dan kelancaran proses Penerjemahan.	
Penguatan Nilai Organisasi	Meningkatkan profesionalisme	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Yudi Chandri Setiawan, S.Pd
NIP	:	199112232018031001
Unit Kerja	:	Bagian Administrasi Luar Negeri Anggota
Jabatan	:	Calon Penerjemah Pertama
Isu	:	Masih terbatasnya pengetahuan penerjemah Setjen DPR RI tentang isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

- 5) Kegiatan 5: Melakukan diseminasi hasil analisa kepada penerjemah dan stakeholder terkait isu-isu strategis yang berpotensi menjadi bahan terjemahan.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Tahapan diseminasi Membuktikan testimoni	Deska's 27/09/2020
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Laporan & Output Pantauan	Yudi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	K.M.B.P. WOG Akuntabilitas	Yudi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung Visi & Misi Organisasi	Yudi
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel, Profesional & Integritas	Yudi